

**LAPORAN AKHIR PENELITIAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN**



**MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN
BERBASIS *WORK SUPERIOR COMPETENCE* MELALUI PUSAT
KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DI KOTA
SEMARANG**

TIM PENGUSUL

Dr. Sungkowo Edy Mulyono, M.Si	NIDN. 0004076801 (Ketua)
Abdul Malik, S.Pd, M. Pd	NIDN. 0010038106 (Anggota)
Ghanis Putra Widhanarto, S. Pd., M. Pd	NIDN. 0019088205 (Anggota)

MAHASISWA

Rista Pratiwi	NIM. 1201417005 (Anggota)
Umar Aziz Al-Bana	NIM. 1201419086 (Anggota)

Dibiayai oleh:

Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Semarang
Nomor: SP DIPA-023.17.2.677507/2020, tanggal 27 Desember 2019, sesuai dengan
Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian Dana DIPA UNNES Tahun 2020
Nomor: 23.27.4/UN37/PPK.3.1/2020, tanggal 27 April 2020

**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

November, 2020

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PENELITIAN PENGEMBANGAN

Judul Penelitian	: Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan Berbasis <i>Work Superior Competence</i> Melalui PKBM di Kota Semarang
Ketua Peneliti	
a. Nama Lengkap dan Gelar	: Dr. Sungkowo Edy Mulyono, M.Si.
b. NIDN	: 0004076801
c. Jabatan Fungsional	: Lektor Kepala
d. Pendidikan S2/S3	: Ekonomi Studi Pembangunan/ Ilmu Ekonomi
e. Fakultas/Jurusan	: FIP/Pendidikan Luar Sekolah
f. Alamat Surel (e-mail)	: sungkowo.edy@mail.unnes.ac.id
Anggota Peneliti (1)	
a. Nama Anggota	: Abdul Malik, S.Pd., M.Pd.
b. NIDN	: 0010038106
c. Program Studi	: Pendidikan Luar Sekolah
d. Fakultas	: Ilmu Pendidikan
Anggota Peneliti (2)	
a. Nama Anggota	: Ghanis Putra Widhanarto, S. Pd., M. Pd.
b. NIDN	: 0019088205
c. Program Studi	: Kurikulum dan Teknologi Pendidikan
d. Fakultas	: Ilmu Pendidikan
Kerjasama dengan Institusi Lain	:
a. Nama Istitusi	: Dinas Pendidikan Kota Semarang
b. Alamat	: Jl. Dr. Wahidin No.118, Jatingaleh, Kec. Candisari, Kota Semarang 50254
c. Telepon/Fax/E-mail	: (024) 8412180
Mahasiswa yang terlibat	: 2 orang
a. Nama/NIM	: Rista Pratiwi/1201417005
b. Nama/NIM	: Umar Aziz Al-Bana/1201419086
Staff Pendukung Penelitian	: 1 orang, Nama: Purwadianto
Alumni terlibat Penelitian	: - orang,
Biaya yang diperlukan	:
a. Sumber dari LPPM Universitas Negeri Semarang	: Rp. 70.000.000,00 (<i>Tujuh Puluh Juta Rupiah</i>)
b. Sumber Lain, sebutkan.....	: Rp. -
Jumlah	: Rp. 70.000.000,00 (<i>Tujuh Puluh Juta Rupiah</i>)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
Dr. Edy Purwanto, M.Pd
NIP. 196301211987031001

Semarang, 9 November 2020

Ketua Pelaksana,

Dr. Sungkowo Edy Mulyono, M.Si
NIP. 196807042005011001

Menyetujui
Ketua Lembaga Penelitian
dan Pengabdian kepada Masyarakat UNNES
Dr. Suwito Eko Pramono, M.Pd.
NIP. 195809201985031003

- 1) Identitas Pelaksana Peneliti:
Dr. Sungkowo Edy Mulyono, M.Si;
ID Sinta : 5982879
ID Scopus : 57211534017
- 2) Abdul Malik, S.Pd, M.Pd;
ID Sinta : 5985266
ID Scopus : 57211540236
- 3) Ghanis Putra Widhanarto S.Pd., M.Pd
ID Sinta : 5986070
ID Scopus : 57193917058
- 4) Jenis Penelitian : Penelitian Pengembangan
Research Cluster : Sosial Humaniora Bercirikan Konservasi
Tema : Inovasi Pendidikan dan Pemberdayaan
Sub Tema : Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan
- 5) Judul Pengabdian : Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin
Perkotaan Berbasis *Work Superior Competence* Melalui PKBM
di Kota Semarang
- 6) Dana yang diusulkan : Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah)

RINGKASAN

Tujuan umum penelitian ini adalah: (a) memandirikan masyarakat miskin perkotaan untuk mempunyai kompetensi kerja yang unggul sesuai kebutuhan pasar; (b) meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin perkotaan dari aspek sosial dan ekonomi. Tujuan khusus penelitian adalah: (1) tersusunya desain model pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan berbasis *work superior competence* melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) (2) menghasilkan instrument produk model hipotetik pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan berbasis *work superior competence* melalui PKBM yang valid dan reliabel.

Penelitian dirancang dengan menggunakan pendekatan *Research and Development* (R & D), yakni penelitian yang ditindaklanjuti dengan pengembangan dan desiminasi suatu produk/prototipe/model. Penelitian ini merupakan tindak lanjut penelitian pendahuluan (studi eksplorasi) dari skim pusat kajian, yang telah mencapai langkah: (1) pengumpulan data (2) pengorganisasian data; (3) analisis dan perumusan desain model. Penelitian ini sebagai tahap kedua atau sebagai tahap pengembangan produk, dilakukan langkah (4) yakni, penyusunan model konseptual, (5) menguji validasi, (6) perbaikan model dan perangkatnya, sehingga menjadi model hipotetik pemberdayaan perempuan melalui kewirausahaan sosial berbasis budaya yang valid. Sedangkan tahap validasi dan desiminasi produk dirancang sebagai tahap ketiga (tahun berikutnya), yakni mencakup langkah (7) program aksi (implementasi model); (8) evaluasi /refleksi; (9) replikasi dan inovasi; dan (10) produk model final dan desiminasi. Singkatnya, penelitian ini bersifat monoyears, kelanjutan penelitian skim pusat kajian. Tahap ini dilakukan mendesain model konseptual, uji validasi, perbaikan Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan Berbasis Work Superior Competence Melalui PKBM di Kota Semarang, sehingga menjadi model hipotetik yang valid.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa profil masyarakat miskin adalah kondisi rumah belum layak karena ukuran rumah kecil, dinding terbuat dari separuh tembok separuh papan bahkan ada yang hanya dari papan dan tripleks, sedang lantai terbuat dari plesteran bukan dari tanah atau ubin, asset yang dimiliki sangat sederhana seperti meja kursi tamu, almari pakaian, serta televisi 14 inci dan 21 inci, kebutuhan air bersih dari sumur, pendapatan rendah, pekerjaan tidak tetap bahkan menganggur, pengeluaran tidak sebanding dengan pendapatan.

Kata Kunci: *pemberdayaan masyarakat, masyarakat miskin perkotaan, work superior competence*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PENELITIAN PENGEMBANGAN	ii
RINGKASAN.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN	7
1.1 Latar Belakang.....	7
1.2 Rumusan Masalah	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tinjauan Pustaka	11
2.2 Penelitian yang Relevan.....	15
2.3 Peta Jalan (<i>Road Map</i>) Penelitian	15
BAB 3 TUJUAN DAN MANFAAT	17
3.1 Tujuan Penelitian.....	17
3.2 Manfaat Penelitian.....	17
BAB 4 METODE PENELITIAN.....	18
4.1 Desain Penelitian	18
4.2 Prosedur Pengembangan.....	20
4.2.1 Melakukan analisis kebutuhan.	20
4.2.2 Merencanakan dan mengembangkan produk.	20
4.2.3 Validasi Ahli	21
4.2.4 Validasi Empirik	21
4.2.5 Revisi produk	21
4.3 Desain Uji Coba Produk.....	21
4.3.1 Desain Uji Coba.....	21
4.3.2 Subjek Uji Coba	22
4.3.3 Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data.....	22
4.3.4 Teknik Analisis Data.....	22
BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN	24
5.1 Hasil Penelitian	24
5.1.1 Deskripsi Hasil Studi Pendahuluan	24
BAB 6 RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN	37
7.1 Kesimpulan	37
7.2 Saran	37
DAFTAR PUSTAKA	39
LAMPIRAN-LAMPIRAN	41
Lampiran A. Instrumen Studi Pendahuluan	41
Lampiran B. Profil Responden Studi Pendahuluan Lapangan.....	48
Lampiran C. Instrumen Uji Validasi Ahli	49

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah kemiskinan bukanlah masalah baru di Indonesia, namun masalah lama yang sulit dipecahkan. Kemiskinan pada akhirnya akan memunculkan berbagai masalah baru, seperti kebodohan, pengangguran, kelaparan, kesenjangan sosial, kesehatan dan kriminalitas. Dampak lain yang ditimbulkan oleh kemiskinan bukan hanya kebutuhan pokok semata, tetapi *demand* akan pendidikan juga ikut terabaikan. Hal itu dibuktikan dengan angka indeks pembangunan manusia yang masih rendah dibandingkan negara lain, hal ini dibuktikan dimana masyarakat miskin sampai tidak mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sehingga timbul pengangguran. Sangat mengkhawatirkan bahwa di zaman yang semakin canggih ini, kemiskinan masih tetap terjadi.

Baik dalam kebijakan maupun wacana keilmuan, istilah kemiskinan telah dilihat melalui kacamata ekonomi dan hampir seluruhnya merujuk pada tingkat pendapatan; garis kemiskinan yang sering dirujuk relatif mudah diukur dan digunakan untuk membandingkan kelompok-kelompok baik di dalam maupun antar negara [1]. Garis-garis kemiskinan ini awalnya didasarkan pada definisi kemiskinan sebagai kemiskinan absolut, di mana kemiskinan dipahami sebagai kekurangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar [2]. Menurut Thohir [3] miskin adalah kondisi yang secara umum menggambarkan seseorang atau suatu rumah tangga atau komunitas berada dalam serba kekurangan, terutama dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan yang paling dasar. Akibat dari itu, yang bersangkutan mengalami berbagai keterbatasan baik terhadap peran-peran secara sosial, ekonomi, politik, maupun budaya. Keterbatasan-keterbatasan seperti itu timbul, akibat dari internal individu atau rumah tangga yang gagal beradaptasi terhadap lingkungan atau didalam merespon perubahan. Pada saat yang sama, dapat saja terjadi sebaliknya, yaitu lingkunganlah yang melahirkan kemiskinan.

Kemiskinan yang melanda bangsa Indonesia dari tahun ke tahun tidak kunjung habis, bahkan terjadi peningkatan sebagaimana data dari BPS pada Maret tahun 2017 sebesar 27,77 juta jiwa atau 10,64 % dari total penduduk saat ini bila dibandingkan September tahun 2016 mencapai 27,76 juta orang (10,70%) . Sedang jumlah pengangguran terbuka pada agustus 2017 sebesar 2,56 juta jiwa atau 6,18% dari jumlah angkatan kerja sebesar 122,38 juta jiwa. Secara geografis penelitian ini berada di wilayah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah yang terletak antara 6^o50' - 7^o10' Lintang Selatan dan garis 109^o 35 - 110^o 50' Bujur Timur. Dibatasi sebelah barat dengan Kabupaten Kendal, sebelah timur dengan Kabupaten Demak, sebelah selatan dengan Kabupaten Semarang dan sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai 13,6 Km.

Secara administratif, Kota Semarang terbagi atas 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Luas Kota Semarang tercatat 373,70 Km². Luas yang ada terdiri dari 39,56 Km² (10'59%) tanah sawah dan 334,14 (89,41%) bukan lahan sawah. Sementara itu, Berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2016, jumlah penduduk Kota Semarang tercatat 1.485.312 jiwa dengan pertumbuhan penduduk ditahun 2016 sebesar 1,41%. Kondisi tersebut memberi arti bahwa pembangunan kependudukan, khususnya usaha untuk menurunkan jumlah kelahiran, memberikan hasil yang nyata. Sekitar 73,96% penduduk Kota Semarang berusia produktif (15-

64) tahun, sehingga angka beban tanggungan, yaitu perbandingan antara penduduk usia produktif dengan penduduk tidak produktif (0-14 dan 65 tahun ke atas) pada tahun 2016 sebesar 35,20% yang berarti 100 orang penduduk usia produktif menanggung 35 orang penduduk usia tidak produktif.

Menurut BPS Provinsi Jawa Tengah 2017, jumlah penduduk tercatat 32,38 juta jiwa. 3,9 juta jiwa adalah penduduk miskin. Jumlah penduduk pengangguran terbuka 2,49 juta jiwa [4], adapun jumlah penduduk Kota Semarang pada Tahun 2017 mencapai 1.765.396 jiwa. Sedang dari jumlah total penduduk yang ada di Kota Semarang yang mengalami kemiskinan mencapai 112.647 jiwa, dan jumlah pengangguran produktif mencapai 243.483 orang [5], seperti sebaran pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin Per-Kecamatan Kota Semarang, Tahun 2017

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Penduduk Miskin	Persentase (%)
1.	Semarang Timur	82.511	11.200	19,349%
2.	Semarang Tengah	69.848	11.058	16,298%
3.	Semarang Barat	176.497	14.420	13,823%
4.	Gajahmungkur	66.409	11.208	13,092%
5.	Semarang Utara	143.436	12.307	13,041%
6.	Semarang Selatan	84.425	5.459	12,157%
7.	Gunungpati	91.241	5.257	11,642%
8.	Tugu	34.674	1.320	10,660%
9.	Genuk	109.540	4.358	9,661%
10.	Mijen	69.575	2.209	9,345%
11.	Candisari	89.976	4.431	8,107%
12.	Tembalang	177.549	7.312	7,614%
13.	Ngaliyan	140.927	5.394	7,531%
14.	Gayamsari	78.420	3.203	7,474%
15.	Banyumanik	147.454	6.201	7,249%
16.	Pedurungan	202.914	7.230	6,623%
Jumlah Total		1.765.396	112.467	100%

Sumber : diolah dari BPS Kota Semarang 2019

Sementara itu, Karakteristik Masyarakat Miskin yang Menganggur dan memiliki potensi yang tersebar di 16 wilayah kecamatan Kota Semarang pada tahun 2017 memiliki jumlah penduduk mencapai 1.765.396 jiwa, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 112.467 jiwa, serta jumlah pengangguran 243.483 orang. Keterbatasan-keterbatasan seperti itu timbul, bisa karena akibat dari internal individu atau rumah tangga yang gagal beradaptasi terhadap lingkungan atau gagal di dalam merespon perubahan. Pada saat yang sama, dapat terjadi sebaliknya, yaitu lingkunganlah yang melahirkan kemiskinan. Mereka yang berkondisi seperti itu dan tidak memiliki aktivitas ekonomi disebut sebagai “miskin penganggur” Berdasarkan hasil wawancara di lapangan terhadap orang miskin yang menganggur adalah katagori orang yang tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan tidak ada lowongan kesempatan untuk bekerja, serta untuk sementara berdiam diri di rumah. Dengan kata lain, indikasi seseorang dikatakan miskin dalam studi ini adalah kalau mereka hanya memiliki pendapatan rendah yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan paling dasar, dilihat

dari rumah yang ditempati tidak layak huni. Namun yang dijadikan sasaran dalam studi ini sebagai subyek pemberdayaan adalah orang miskin menganggur yang memiliki kemampuan baik berupa pendidikan, usia produktif antara berusia 15-45 tahun (Depdiknas,2016) serta berpotensi.

Tujuan dibalik pemberdayaan kepada orang miskin yang menganggur yang berciri seperti di atas adalah agar orang miskin tersebut akhirnya mampu mewujudkan usaha mandiri, atau bermata pencaharian sehingga ekonominya meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan keluarga.

Kota Semarang merupakan wilayah yang berada di Pulau Jawa khususnya Provinsi Jawa Tengah negara Indonesia. Secara geografis kota Semarang berada di Kota Semarang dari jumlah penduduk mencapai 1.765.396 penduduk miskin sebesar 112.467 jiwa. Salah satu jalan keluar dalam rangka mengatasi kemiskinan diperlukan model pemberdayaan masyarakat miskin khususnya wilayah perkotaan. Model strategi pemberdayaan masyarakat miskin yang selama ini telah diterapkan diberbagai kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan khususnya di wilayah perkotaan telah berjalan bertahun-tahun lamanya, namun hasil yang didapat tidak begitu signifikan atau tidak sesuai tujuan yang diinginkan. Hal itu terjadi lebih dikarenakan konsep strategi pemberdayaan belum berdasarkan pada kebutuhan masyarakat serta kebutuhan pasar, sehingga program pemberdayaan sering tidak memenuhi sasaran. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Semarang, sejak tahun 2014-2015 terdapat 21 program pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan, dengan jumlah 210 peserta pelatihan dan yang berhasil lulus mencapai 127 peserta, sementara sisanya keluar dari program pendidikan dan pelatihan dengan alasan program yang diberikan tidak sesuai yang diharapkan. Dari jumlah 127 atau 60,45% yang berhasil lulus pelatihan hanya 95 atau 45,2 % dari total peserta pelatihan, dengan perincian 63 bekerja di perusahaan, home industri serta perkantoran, dan 32 peserta pelatihan melakukan usaha mandiri seperti bengkel, menjahit, serta dagang.

Peserta pendidikan dan pelatihan pada umumnya berasal dari ekonomi lemah (miskin), adapun tujuan mengikuti program pemberdayaan masyarakat adalah agar memiliki dan atau dapat meningkatkan keterampilan yang pada akhirnya dapat meningkatkan ekonominya. Pendapat Ravallion [6] mengatakan bahwa peluang kerja bagi masyarakat perkotaan jauh lebih mudah dari pedesaan, karena di perkotaan banyak home industri, perusahaan, lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta serta lebih banyak peluang usaha yang akan menyerap tenaga kerja. Selain itu kemiskinan di perkotaan bukan disebabkan oleh keadaan tidak adanya (atau kurangnya) lapangan kerja, tetapi hampir semua orang miskin di kota adalah "*working poor*" (orang yang memiliki pekerjaan tetapi tetap miskin) dan yang menjadi salah satu penyebabnya adalah mereka memiliki *skills* yang rendah tidak sesuai kebutuhan pasar. Meski memiliki *income* lebih tinggi dibanding kaum miskin di desa-desa, kaum miskin di kota harus mengeluarkan biaya tambahan karena biaya hidup tinggi seperti biaya kesempatan, biaya kesehatan, dan biaya social. Kotze [7] menyatakan bahwa masyarakat miskin pada dasarnya memiliki kemampuan yang relatif baik untuk memperoleh sumber melalui kesempatan yang ada. Kendatipun bantuan luar kadang-kadang digunakan, akan tetapi tidak begitu saja dapat dipastikan, sehingga masyarakat bergantung dukungan dari luar. Konsep pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kebutuhan pasar diatas perlu adanya pemetaan arah pemenuhan kebutuhan pasar sehingga kompetensi kebutuhan pasar selaras dengan basic yang dimiliki masyarakat miskin perkotaan untuk mampu

memenuhi kebutuhan tersebut dan berdampak pada penghasilan yang bermuara pada pengentasan kemiskinan. Program pelatihan yang dilakukan perlu mengarahkan pada analisis kebutuhan makro dan micro sehingga valid dan reliabel sesuai keadaan pasar.

Berdasarkan fenomena di atas yang menjadi ruang lingkup serta permasalahan maka perlu adanya strategi model pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan berbasis *work superior competence* melalui PKBM.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, hasil analisis profil masyarakat miskin di Kota Semarang, analisis pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan, maka masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah desain model konseptual pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan berbasis *work superior competence* melalui PKBM?
2. Bagaimana tingkat validitas dan reliabilitas instrument kualitas model hipotetik pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan berbasis *work superior competence* melalui PKBM?

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Kemiskinan sering dipertimbangkan sebagai masalah yang sepenuhnya bersifat sosial. Dimasa mendatang, kemiskinan perkotaan akan menjadi tantangan utama bagi para pembuat kebijaksanaan dikawasan-kawasan Asia-Pasifik. Ketika populasi terus meningkat, intensitas kemiskinan juga ikut meningkat. Para pembuat kebijaksanaan tingkat lokal maupun nasional memerlukan pemahaman mendalam terhadap sifat kemiskinan perkotaan dan juga memerlukan data akurat yang menunjukkan dinamika, kecenderungan-kecenderungan, dan kondisi kemiskinan di perkotaan. Dengan menggunakan tiga dimensi yaitu: (1) keadaan tidak memiliki *income*; (2) keadaan tidak memiliki akses menuju pelayanan-pelayanan umum; dan (3) keadaan tidak memiliki *power* atau keadaan tidak berdaya, kajian ini memberikan gambaran luas tentang sifat-sifat kemiskinan perkotaan beserta intensitasnya. Ketiga dimensi ini saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Miskin adalah kondisi yang secara umum menggambarkan suatu rumah tangga, komunitas, atau seseorang yang berada dalam serba kekurangan, terutama dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan yang paling dasar [3]. Akibat dari itu yang bersangkutan mengalami berbagai keterbatasan baik terhadap peran-peran yang secara sosial, ekonomi, politik, maupun budaya yang harus dilakukan [8].

Menurut Ravallion [6] Kemiskinan umumnya dipertimbangkan sebagai masalah pedesaan. Kaum miskin di pedesaan tidak memiliki *income* ataupun tanah yang dapat diolah serta tidak mendapatkan pelayanan-pelayanan umum tertentu, sementara suaranya hampir tidak pernah didengar apalagi diperhatikan. Disisi lain, kaum miskin di perkotaan dipertimbangkan memiliki keadaan yang jauh lebih baik. Kaum miskin perkotaan memiliki pekerjaan, memiliki *income*, tinggal dekat dengan pusat-pusat pelayanan umum, dan memiliki lebih besar kemungkinan untuk dapat didengar suara hatinya. Sepintas pandang, kaum miskin perkotaan memiliki semua (tiga dimensi pra-syarat) yang tidak dimiliki kaum miskin pedesaan. Tetapi jika kemiskinan perkotaan tidak diperhatikan, keadaan terus berlanjutnya proses urbanisasi akan mengakibatkan terjadinya peningkatan intensitas kemiskinan dan ketidaksedrajatan. Pada giliran selanjutnya, peningkatan ketidak sedrajatan ini akan dapat mengakibatkan terjadinya konflik antar berbeda-beda kelompok ekonomi. Kemiskinan perkotaan dipengaruhi oleh keharusan mengeluarkan lebih banyak uang untuk tempat tinggal, makan, transportasi, dan layanan-layanan lain. Kemiskinan perkotaan juga dicirikan oleh keadaan tidak dapat memperoleh mandat dari program-program pembangunan tertentu. Kemiskinan perkotaan tidak dapat secara mudah ditangani melalui pendekatan-pendekatan berbasis komunitas yang dibangun untuk menangani kemiskinan pedesaan.

Sekitar 641 juta populasi Asia-Pasifik hidup dengan *income* kurang dari 1 dollar per hari per orang, dan sekitar 65% sampai 80% dari mereka tinggal di kota-kota. Jika taksiran tersebut memang benar, maka ada sekitar 130 sampai 210 juta orang miskin di kota-kota [6]. Kemiskinan pedesaan di Asia-Pasifik terus menurun intensitasnya, sedangkan kemiskinan perkotaan semakin meningkat, dari 136 juta orang pada tahun 1993 menjadi 142 juta orang pada tahun 2002. Kemiskinan di perkotaan bukan disebabkan oleh keadaan tidak adanya (atau kurangnya) lapangan kerja, tetapi hampir semua orang miskin di kota adalah “*working poor*” (orang yang memiliki pekerjaan tetapi tetap miskin). Meski memiliki *income* lebih tinggi dibanding kaum miskin di desa-desa, kaum miskin di kota harus mengeluarkan biaya tambahan

seperti Biaya hidup yang tinggi (kebutuhan pangan dan pelayanan-pelayanan tertentu), biaya kesempatan, yaitu keadaan harus menunggu suatu pelayanan tertentu yang diberikan oleh pemerintah yang mungkin saja akan merupakan pelayanan gratis. Akibat dari semua faktor tersebut di atas adalah: (1) Keadaan lebih sedikitnya uang yang dapat digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan mendasar, (2) *income* yang menjadi tidak terjamin kepastiannya, (3) kesehatan yang dipengaruhi oleh kondisi kerja dan kondisi tempat tinggal yang buruk. Keadaan-keadaan tersebut sesuai dengan pendapat Sen [8] seperti yang telah diuraikan didepan.

Selama beberapa dekade terakhir, banyak negara di Asia-Pasifik mengalami pertumbuhan ekonomi secara cepat sehingga mampu mengentaskan berjuta-juta penduduk dari “kemiskinan yang secara mutlak disebabkan oleh *income*”. Di kota-kota, sebagian besar pertumbuhan ekonomi terjadi di dalam sektor nonpertanian. GDP tumbuh 6,2% per tahun, armada kerja tumbuh 1,6% tetapi lapangan kerja di sektor formal tumbuh hanya 1,4%, karena pertumbuhan GDP menghasilkan lebih sedikit lapangan kerja, maka efek pengaruh terhadap usaha mengurangi intensitas kemiskinan menjadi menurun [8].

Lapangan kerja di kota tetap berintensitas sangat rendah, khususnya di negara-negara yang intensitas kemiskinannya tinggi. Penyebabnya adalah karena pria dan wanita miskin di kota “hampir tidak pernah nganggur”. Mereka terus-menerus bekerja di dalam lapangan kerja berproduktivitas rendah sehingga *income* juga terus-menerus rendah. ILO menaksir bahwa 900 juta pekerja di Asia tidak dapat meningkatkan status keluarganya sampai di atas garis kemiskinan sebesar \$ 2 biaya hidup per hari per orang.

Tjokrowinoto (1998), mengatakan bahwa strategi mengatasi kemiskinan adalah pemberdayaan (*empowerment*) yang mengarah pada kemandirian masyarakat. Dalam konteks ini, dimensi partisipasi masyarakat menjadi sangat penting. Melalui partisipasi kemampuan masyarakat dan perjuangan mereka untuk membangkitkan dan menopang pertumbuhan kolektif menjadi kuat. Tetapi partisipasi di sini bukan hanya berarti keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan atau masyarakat hanya ditempatkan sebagai "obyek", melainkan harus diikuti keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan dan proses perencanaan pembangunan, atau masyarakat juga ditempatkan sebagai "subyek" utama yang harus menentukan jalannya pembangunan. Karena itu gerakan pemberdayaan menilai tinggi dan mempertimbangkan inisiatif dan perbedaan local.

Ravallion [6] mengatakan pertumbuhan ekonomi telah banyak mengentaskan berjuta-juta orang dari kemiskinan. Tetapi mengurangi kemiskinan hanya melalui pertumbuhan ekonomi akan bersifat lebih sulit, karena kita tidak memiliki kepastian atau jaminan apapun bahwa semua kaum miskin memiliki kemampuan untuk memanfaatkan peluang-peluang baru yang tercipta dari pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini benar-benar diperlukan campur tangan kebijakan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki cakupan luas dan manfaatnya benar-benar tertuju pada kaum miskin. Kaum miskin harus ditunjang untuk mengembangkan aktivitas-aktivitas ekonominya, untuk meningkatkan produktivitas dan *income*-nya. Kebijakan yang bersifat menghambat perkembangan aktivitas-aktivitas nonformal jelas akan tidak membantu pengentasan kemiskinan. Dalam hal ini, harus ada kemauan politik pada diri para politisi dan para pembuat kebijakan untuk menerapkan prinsip-prinsip kepengaturan perkotaan yang baik.

Sesungguhnya kemiskinan juga dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan tidak terpenuhinya hak-hak manusia, asalkan dua persyaratan dibawah ini benar-benar terpenuhi: (1) Hak-hak manusia yang bersangkutan harus merupakan hak-hak yang bersesuaian dengan kemampuan-kemampuan yang oleh masyarakat dipertimbangkan bersifat mendasar. (2) Adanya kendali yang tidak memadai terhadap sumber-sumber ekonomi, dimana kendali yang tidak memadai tersebut bersifat mempengaruhi mata-rantai hubungan sebab-akibat yang mengakibatkan terjadinya keadaan tidak terpenuhinya hak-hak manusia itu sendiri. Dalam hal ini, usaha menunjang hak-hak manusia untuk berpartisipasi secara aktif didalam proses pembuatan berbagai jenis keputusan akan sangat menentukan bagi usaha meningkatkan kualitas kehidupan sosio-ekonomi masyarakat miskin.

Salah satu cara mengatasi kemiskinan perkotaan adalah dengan memberdayakan masyarakat miskin perkotaan melalui pendidikan dan pelatihan agar memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar. Usman (2000), pemberdayaan adalah suatu proses pembelajaran masyarakat untuk mengembangkan seluruh potensi agar dapat berperanserta dalam pembangunan. Sebagai suatu proses pembelajaran, maka ia adalah suatu proses peningkatan kemampuan pada seseorang atau kelompok orang agar dapat memahami dan mengontrol kekuatan-kekuatan sosial, ekonomi, dan atau politik sehingga dapat memperbaiki kedudukannya di tengah-tengah masyarakat. Pemberdayaan masyarakat membutuhkan komitmen yang tinggi yang dilakukan oleh pekerja sosial di India dan itu memiliki dampak atau efek positif dalam pemberdayaan masyarakat [9]. Selain itu agar pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik membutuhkan model, sebagaimana hasil penelitian Shildrick dan MacDonald [10], tentang model kemiskinan di Australia yang menggambarkan strategi dan dampak kemiskinan, dan pada akhirnya memiliki dampak yang lebih besar pada kebijakan anti-kemiskinan.

Dari perspektif ekonomi, pendidikan merupakan upaya mempersiapkan sumber daya manusia (human investment) yang handal, untuk nantinya menjadi subyek penggerak pembangunan ekonomi. Oleh karena itu pendidikan harus mampu melahirkan lulusan bermutu yang memiliki pengetahuan, menguasai teknologi, dan mempunyai keterampilan teknis yang memadai. Di sinilah maknanya, mengapa pendidikan baik, formal maupun nonformal, harus dapat menghasilkan tenaga-tenaga profesional yang memiliki kemampuan kewirausahaan, sekaligus menjadi salah satu pilar utama aktivitas perekonomian nasional. Peran pendidikan menjadi sangat penting dan strategis untuk meningkatkan daya saing nasional dan membangun kemandirian bangsa, yang menjadi prasyarat mutlak dalam memasuki persaingan (Cheng, 1992).

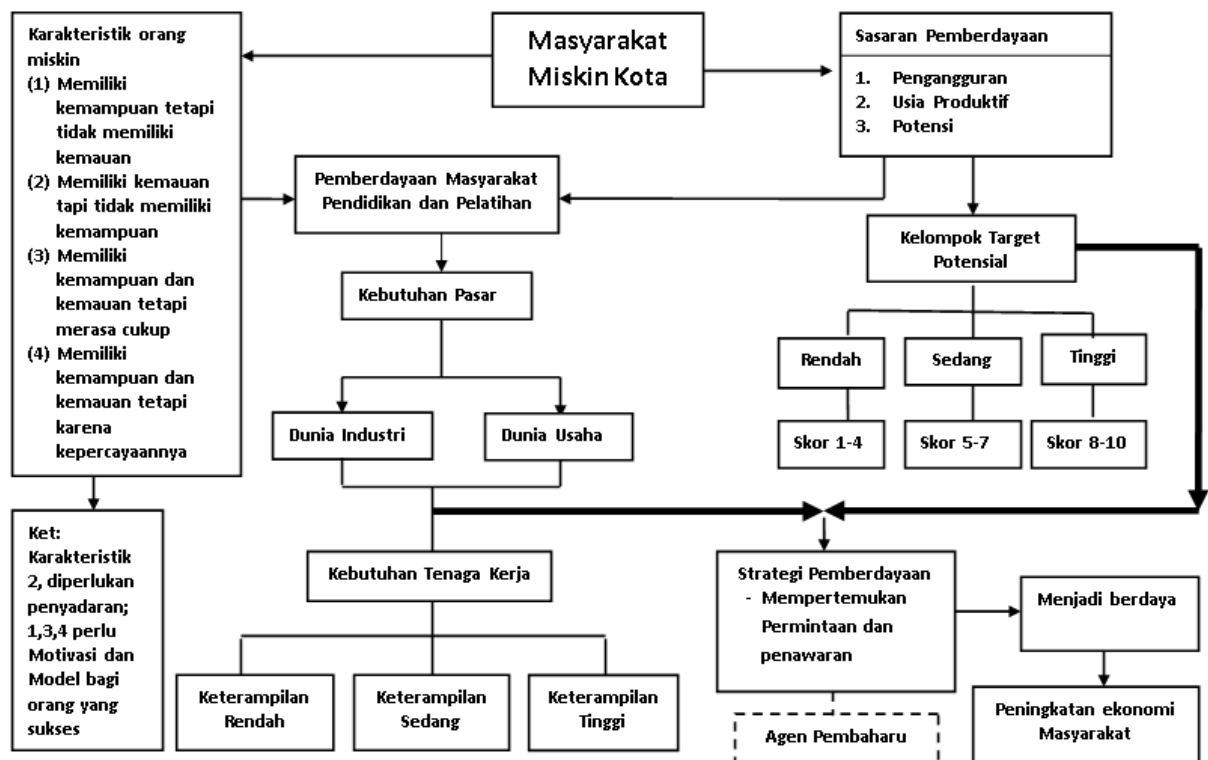
Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandirianya, bahkan merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan, serta sumber lainnya. Dalam rangka mencapai tujuan, mereka tanpa bergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal. Namun demikian, McArdle mengimplikasikan hal tersebut bukan untuk mencapai tujuan, melainkan makna pentingnya proses dalam pengambilan keputusan secara partisipatoris [11].

Pandangan yang lebih jelas dikemukakan oleh McArdle [11] bahwa hal terpenting dalam pemberdayaan adalah partisipasi aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan. Pola demikian sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan pribadi, diantara banyak pilihan yang ada dimasyarakat. Namun demikian, pada kenyataannya seluruhnya dikerjakan oleh para

profesional atas nama “pemberdayaan”. Oleh karena itu, banyak kritikan yang diarahkan terhadap pendekatan pemberdayaan. Pendekatan tersebut dapat gagal menjalankan fungsinya dalam proses kontrol terhadap masyarakat untuk akses terhadap sumber. Sebaliknya, pendekatan tersebut justru menjadikan masyarakat menjadi tidak mampu diberdayakan. Pendidikan dan pelatihan akan meningkatkan investasinya, pengetahuan akan menjadi dasar terjadinya pertumbuhan ekonomi dan produktivitas, dimana pertumbuhan lapangan kerja akan terjadi terutama dalam kedudukan kerja jenis “white collar” dan jenis profesional. Pertumbuhan lapangan kerja akan terjadi hanya didalam pekerjaan jenis profesional, dan mengangjurkan agar lembaga dan pelatihan mencurahkan perhatian pada semua jenis keahlian dan kompetensi yang diperlukan oleh armada kerja di masa yang akan datang sambil tentu saja terus mengerjakan keahlian-keahlian dasar seperti matematika, membaca, dan berpola fikir cerdas [12].

Strategi pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan telah dianalisis pada penelitian sebelumnya dengan skim pusat kajian dana DIPA LPPM tahun 2019 [13], hasilnya diringkas dalam uraian berikut.

Terdapat beberapa alur strategi pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan (1) masyarakat miskin perkotaan (2) sasaran pemberdayaan (3) target sasaran dan potensi (4) pendidikan dan pelatihan (5) karakteristik dan keinginan masyarakat (6) kebutuhan pasar dunia usaha/dunia industri (7) mempertemukan antara hasil pelatihan sesuai kebutuhan pasar dan kelompok target potensi oleh Agen Pembaharu (8) masyarakat berdaya (9) meningkatkan ekonominya. yang kemudian strategi ini dijadikan suatu model strategi pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan melalui pendidikan dan pelatihan [13]. Alur tersebut digambarkan pada strategi pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kebutuhan pasar berikut.



Sumber: Hostter [9], Mulyono [13] dengan modifikasi seperlunya

Gambar 2.1. Konsep Model Strategi Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat Miskin Perkotaan Melalui Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kebutuhan Pasar [13]

Mulyono menyatakan bahwa [13] ditetapkan sebagai model sebagaimana yang diungkapkan oleh [9], menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat membutuhkan komitmen yang tinggi oleh pekerja social (agen pembaharu) dan itu memiliki dampak atau pengaruh positif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

Konsep pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kebutuhan pasar diatas perlu adanya pemetakan arah pemenuhan kebutuhan pasar sehingga kompetensi kebutuhan pasar selaras dengan basic yang dimiliki masyarakat miskin perkotaan mampu memenuhi kebutuhan tersebut dan berdampak pada penghasilan yang bermuara pada pengentasan kemiskinan. Program pelatihan yang dilakukan perlu mengarahkan pada analisis kebutuhan makro dan micro sehingga valid dan reliabel sesuai keadaan pasar.

2.2 Penelitian yang Relevan

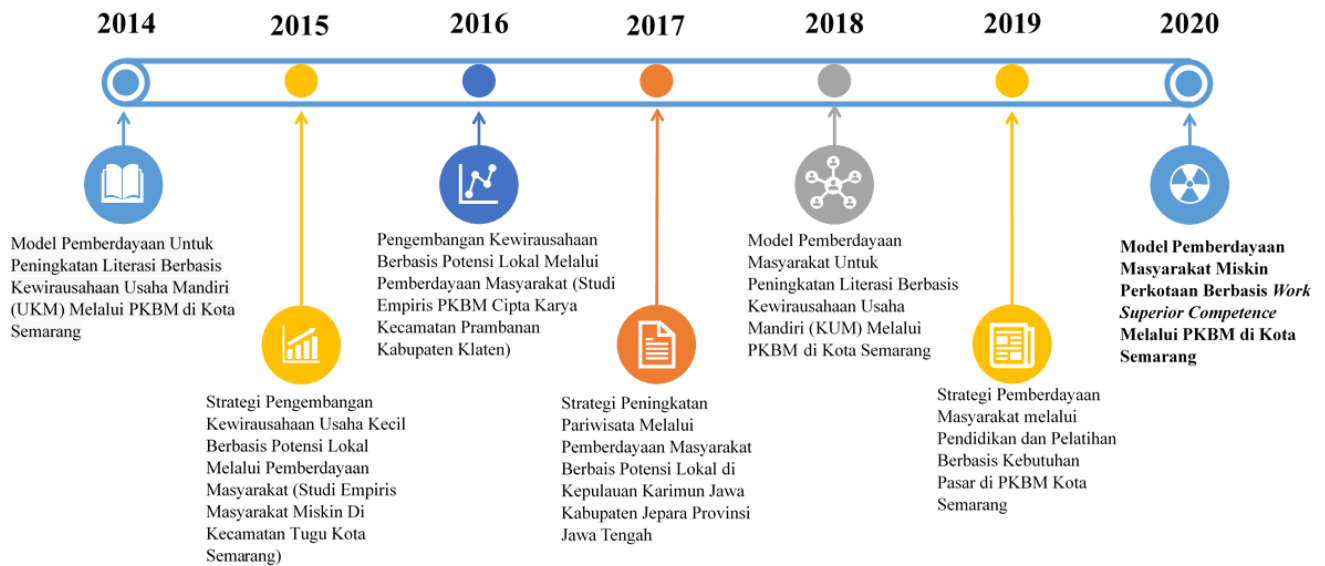
Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah penelitian yang berjudul “Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan Berbasis *Work Superior Competence* Melalui PKBM di Kota Semarang” adalah sebagai berikut

1. Dari penelitian yang berjudul *a mosque-based economic empowerment model for urban poor community* menyebutkan bahwa dalam penelitiannya bahwa model pemberdayaannya menghasilkan dampak ekonomi yang baik untuk seluruh masyarakat yang mengitu model pemberdayaan tersebut selain itu hasil luarannya berupa pembangunan masyarakat, pembangunan wirausaha, pembangunan lingkungan dan pembangunan dalam instansi [14].
2. Dari penelitian yang berjudul *social work and the casualties of capitalism: empowerment of the urban poor* menyebutkan bahwa pemberdayaan adalah proses yang dapat terjadi dalam iklim keadilan dan keadilan untuk menghasilkan rasa keadilan dan nilai pribadi dan untuk memobilisasi masyarakat miskin dan kelas menengah untuk perubahan sosial [15].
3. Dari penelitian yang berjudul *the world at her fingertips?: examining the empowerment potential of mobile phones among poor housewives in srilanka* menyebutkan bahwa pemberdayaan wanita miskin perkotaan melalui telepon seluler yang telah dilakukan menunjukkan akses ke telepon seluler secara tegas memperkuat dan memperluas lingkaran sosial dan jaringan mereka; mereka saling mengarahkan ke teknologi domestik, sehingga menantang sikap sosial negatif terhadap perempuan sebagai seorang yang tidak kompeten dan kurang secara teknologi; dengan hal ini mereka mengurangi kemiskinan informasi wanita; dan membukan ke ruang menyenangkan yang lebih baru, non-tradisional, yang merupakan manifestasi yang jelas dari pilihan dan kekuatan [16].
4. Dari penelitian *Thriving in the slums: progressive development and empowerment of the urban poor to achieve secure tenure in the Philippines* menyebutkan bahwa kebijakan Filipina pro-poor menempatkan nilai lebih pada peran orang dalam penyediaan perumahan dan evolusi lingkungan buatan terbukti berhasil dalam meningkatkan kualitas hidup warga termiskin. Studi kasus ini memberikan model peran yang berguna untuk pembangunan yang serupa terutama di negara-negara miskin yang kaya akan sumber daya manusia [17].

2.3 Peta Jalan (Road Map) Penelitian

Road map bidang kajian penelitian tentang pemberdayaan masyarakat yang dilakukan peneliti sudah dilakukan sejak tahun 2014. Bidang kajian penelitian ini mengacu pada bidang

unggulan yang telah ditetapkan dalam Renstra LP2M UNNES, yakni bidang Pemberdayaan Masyarakat, khususnya pada jalur pendidikan nonformal. Peta jalan (*Road Map*) penelitian digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.1 Road Map Penelitian Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan Berbasis Work Superior Competency Melalui PKBM di Kota Semarang, Sesuai Kebijakan Renstra LP2M UNNES Topik Bidang Pembangunan Masyarakat
Road map bidang penelitian tentang pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan telah peneliti lakukan sejak tahun 2014, mengacu pada Renstra Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNNES.

BAB 3 TUJUAN DAN MANFAAT

3.1 Tujuan Penelitian

- a. Tujuan umum jangka panjang penelitian ini adalah: (a) memandirikan masyarakat miskin perkotaan untuk mempunyai kompetensi kerja yang unggul sesuai kebutuhan pasar; (b) meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin perkotaan dari aspek sosial dan ekonomi.
- b. Tujuan khusus penelitian adalah: (1) tersusunya desain model pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan berbasis *work superior competence* melalui PKBM (2) menghasilkan instrument produk model hipotetik pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan berbasis *work superior competence* melalui PKBM yang valid dan reliabel.

3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan praktis.

- a. Secara teoritis, hasil penelitian berkontribusi untuk mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan model pengembangan sumber daya manusia melalui pendekatan pemberdayaan. Disamping itu hasil penelitian juga berkontribusi untuk mengembangkan keilmuan pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan Pendidikan nonformal.
- b. Secara praktis, hasil penelitian kontribusi bagi:
 - Pengambil kebijakana, dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk membuat aturan atau regulasi tentang strategi pembangunan masyarakat.
 - Dinas Sosial Jawa Tengah dapat memanfaatkan model pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan berbasis *work superior competence* melalui PKBM, untuk mengurangi masalah pengangguran dan kemiskinan, karena mendukung peningkatan kompetensi masyarakat miskin memiliki kompetensi kerja sesuai kebutuhan pasar.
 - Jurusan Pendidikan Luar Sekolah dapat memanfaatkan hasil penelitian untuk mengembangkan inovasi model pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan dan manajemen program pendidikan nonformal sesuai dengan permasalahan yang aktual di masyarakat miskin kota.

BAB 4 METODE PENELITIAN

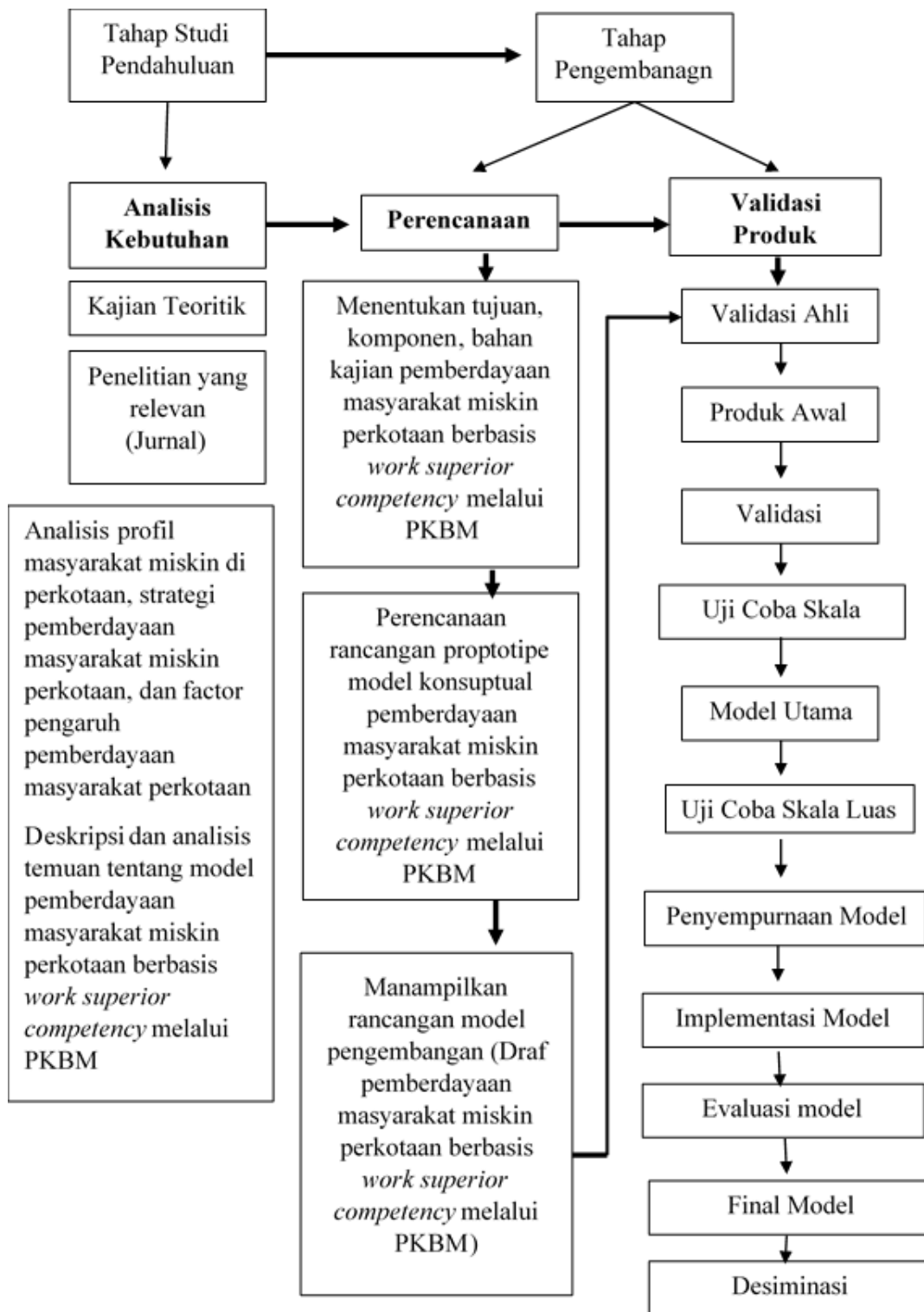
4.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian *research and development* yang digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan pembelajaran. Penelitian dan pengembangan merupakan pada dasarnya penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji kelayakan produk tersebut [18].

Penelitian dan pengembangan pendidikan tidak hanya menekankan pada materi, namun juga menyangkut juga prosedur dan prosesnya. Dasar pengembangan model pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan berbasis *work superior competency* melalui PKBM di Kota Semarang karena jenis penelitian dan pengembangan ini berorientasi pada produk. Melalui penelitian dan pengembangan diharapkan dapat menjembatani kesenjangan penelitian yang lebih banyak menguji teori kearah menghasilkan produk-produk yang digunakan oleh pengguna [19]

Salah satu model penelitian dan pengembangan model ini dapat berupa model prosedural yang telah dikemukakan oleh [20]. Berdasarkan model Borg dan Gall, maka dalam penelitian ini memodifikasi model prosedural Borg dan Gall dalam mengembangkan model pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan berbasis *work superior competency* melalui PKBM di Kota Semarang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model penelitian dan pengembangan yang terdiri dari tiga langkah diantaranya: studi pendahuluan atau analisis kebutuhan, perencanaan dan pengembangan, serta validasi model. Serta visual dapat dilihat pada gambar 3.1 di bawah ini:

Visualisasi ketiga langkah kegiatan R&D sebagai berikut:



Prosedur penelitian dan pengembangan pada dasarnya terdiri dari dua tujuan utama, yaitu: (1) mengembangkan produk, dan (2) menguji kelayakan produk untuk mencapai tujuan. Tujuan pertama disebut sebagai fungsi validitas, sedangkan tujuan kedua disebut sebagai fungsi uji kelayakan. Adapun prosedur utama dalam penelitian pengembangan ini terdiri dari lima langkah yaitu:

1. Melakukan analisis kebutuhan.

2. Menembangkan produk awal.
3. Validasi ahli.
4. Validasi empiric (uji coba lapangan).
5. Revisi produk.

Desain uji coba produk dalam penelitian dan pengembangan menggunakan metode *confirmatory factor analysis* pada model aplikasi yang dikembangkan. Jenis data dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif. Instrumen pengumpulan data penilaian draf model pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan berbasis *work superior competency* melalui PKBM menggunakan teknik *non-test* yaitu dengan questioner. Model pengembangan dalam penelitian ini adalah model procedural karena menggunakan langkah-langkah yang diikuti untuk menghasilkan model pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan berbasis *work superior competency* melalui PKBM.

4.2 Prosedur Pengembangan

Prosedur pengembangan merupakan tahap-tahap yang harus diikuti sebelum menghasilkan produk. Pada dasarnya penelitian dan pengembangan terdiri dari dua tujuan utama yaitu mengembangkan produk dan menguji keefektifan produk dalam mencapai tujuan [20]. Prosedur penelitian dan pengembangan yang dinyatakan oleh Borg dan Gall tidak harus diikuti, tapi setiap pengembang memilih atau memodifikasi langkah-langkah yang sesuai dengan penelitiannya berdasarkan kondisi dan kendala yang dihadapi.

Prosedur atau langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan lima langkah yang utama yaitu:

4.2.1 Melakukan analisis kebutuhan.

- a. Analisis literatur/kajian teoritik dan penelitian yang relevan (buku, laporan penelitian, dan jurnal penelitian).
- b. Analisis profil masyarakat miskin di perkotaan, strategi pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan, dan factor pengaruh pemberdayaan masyarakat perkotaan.
- c. Deskripsi dan analisis temuan tentang model pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan berbasis *work superior competency* melalui PKBM.

4.2.2 Merencanakan dan mengembangkan produk.

Berdasarkan kebutuhan produk yang dikembangkan, langkah-langkah dalam merencanakan dan mengembangkan draf produk adalah sebagai berikut:

- a. Merancang model pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan berbasis *work superior competency* melalui PKBM. dan menentukan klasifikasi hasil analisis studi pendahuluan.
- b. Mengkonsultasikan hasil dari keempat tahapan diatas pada pakar pemberdayaan masyarakat dan pakar PNF.
- c. Merancang dan mengembangkan model pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan berbasis *work superior competency* melalui PKBM.
- d. Menentukan tujuan, isi, penilaian dan pola pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan berbasis *work superior competency* melalui PKBM.
- e. Pengembangan prosedur instrumen implementasi model pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan berbasis *work superior competency* melalui PKBM di Kota Semarang.

- f. Menyusun draf model pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan berbasis *work superior competency* melalui PKBM di Kota Semarang.

4.2.3 Validasi Ahli

Validasi ahli dalam penelitian ini menggunakan evaluasi formatif terhadap model pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan yang telah dikembangkan. Validasi ahli ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi kelayakan model pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan berbasis *work superior competency* melalui PKBM di Kota Semarang. Tahapan ini dilakukan untuk uji kelayakan dari 6 (dua) orang ahli yang berasal dari pakar pemberdayaan masyarakat dan pakar PNF. Kegiatan validasi draf model pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan berbasis *work superior competency* melalui PKBM dilaksanakan dengan menerapkan metode diskusi terpumpun (*Focus Group Discussion*). Tahapan ini mengandung kegiatan mengevaluasi dan merevisi produk atau menyempurnakan produk yang siap untuk diujicobakan.

4.2.4 Validasi Empirik

Validasi empiric dilakukan untuk mendapat tanggapan dan penyempurnaan produk, sehingga nantinya dihasilkan produk akhir berupa model pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan berbasis *work superior competency* melalui PKBM di Kota Semarang. Validitas empiric dilakukan melalui uji coba. Uji coba terdiri dari uji coba skala kecil dan uji coba skala luas.

4.2.5 Revisi produk

Revisi digunakan untuk menyempurnakan produk yang dikembangkan. Revisi dilakukan berdasarkan saran dan masukan-masukan dari para ahli yang ditetapkan sebagai validator.

4.3 Desain Uji Coba Produk

4.3.1 Desain Uji Coba

Uji coba produk dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang dapat digunakan sebagai dasar menetapkan tingkat kelayakan, factor pendukung serta penghambat implementasi model pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan berbasis *work superior competency* melalui PKBM yang dihasilkan. Desain penelitian dan pengembangan ini, uji coba produk dilakukan dua tahap yaitu uji coba skala terbatas dan uji coba skala luas.

4.3.1.1 Uji Validasi Ahli

Pada tahap ini, produk model pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan berbasis *work superior competency* melalui PKBM yang dikembangkan akan divalidasi oleh dua ahli media dan dua ahli yang menguasai bidangnya menggunakan instrumen yang telah disusun sebelumnya. Selanjutnya dilakukan revisi sesuai dengan masukan kedua ahli tersebut. Apabila ahli telah menyetujui hasil revisi, maka dilanjutkan ke uji lapangan.

4.3.1.2 Uji Lapangan

Uji lapangan dilakukan setelah uji ahli diberikan. Uji lapangan terdiri dua tahap yaitu uji skala terbatas dan uji skala luas. Uji skala terbatas diberikan pada kelompok kecil. Agar tidak bias, uji kelompok kecil ini akan diujikan kepada peserta pemberdayaan masyarakat yang masuk kategori miskin di Kota Semarang dalam jumlah terbatas.. Uji coba skala luas dalam penelitian ini akan diujikan kepada peserta pemberdayaan masyarakat yang masuk kategori miskin di Kota Semarang dalam jumlah peserta besar. Tujuan diberikan uji skala luas ini yaitu

untuk mengetahui respon responden tentang produk model yang digunakan. Setelah instrumen responden diperoleh, langkah selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis.

4.3.2 Subjek Uji Coba

Subjek uji coba atau responden yang terlibat dalam penelitian ini adalah peserta program pemberdayaan masyarakat yang masuk kategori miskin di Kota Semarang.

4.3.3 Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono [18], instrument penelitian sangatlah penting dalam melakukan penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya kuesioner, wawancara, observasi dan studi documenter yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan [21]. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain:

1) Wawancara

Wawancara mendalam (*in-depth interviewing*) dengan instrumen pedoman wawancara terbuka dilakukan untuk menjangkau data-data dari informan kunci dengan struktur yang fleksibel agar informasi yang diperoleh memiliki kedalaman yang cukup. Wawancara dilakukan kepada masyarakat miskin kota Semarang yang mengikuti program pemberdayaan masyarakat..

2) Observasi

Observasi non partisipan yang dilakukan secara terfokus dan seksama dengan instrumen lembar observasi yang terstruktur menggunakan skala untuk memperoleh data yang berkenaan dengan pola perilaku sosial masyarakat miskin kota Semarang. Pencatatan hasil amatan diikuti dengan perekaman kegiatan pemberdayaan, kehidupan sehari-hari masyarakat miskin kota Semarang melalui kamera foto.

3) Kuesioner

Kuesioner dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data dari ahli, dan peserta pemberdayaan masyarakat miskin. Kuesioner yang digunakan oleh ahli berupa sejumlah pernyataan yang harus dijawab dengan alternative jawaban berskala yang telah disediakan. Sedangkan kuesioner untuk peserta pemberdayaan masyarakat menggunakan sejumlah pernyataan yang harus dijawab dengan alternative jawaban berskala yang telah disediakan.

4) Studi dokumentasi

Studi dokumenter, dilakukan pada dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, termasuk penelaahan terhadap produk materi pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan berbasis *work superior competency*

4.3.4 Teknik Analisis Data

Data hasil uji coba akan dianalisis secara diskriptif analitik, dengan melakukan pencermatan dan telaah secara mendalam terhadap informasi dan atau umpan balik yang dapat dijangkau dari subjek uji coba. Produk masyarakat miskin perkotaan berbasis *work superior*

competency melalui PKBM ini akan dikatakan berhasil dengan baik apabila dapat digunakan sebagai strategi pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan secara efektif.

Analisis kualitatif digunakan untuk kegiatan studi eksplorasi dan untuk mengetahui profil, factor pendukung dan penghambat penerapan model pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan berbasis *work superior competency* melalui PKBM di Kota Semarang. Prosedur analisis yang digunakan yaitu keabsahan data dengan cara uji kredibilitas menggunakan triangulasi data. Sedangkan analysis data kualitatif melalui tahapan pengumpulan dan pemeriksaan data di lapangan, reduksi data, pemaparan/ penyajian data dan penarikan kesimpulan [21].

Analisis data kuantitatif menggunakan deskriptif persentase untuk mengetahui mean, median, dan modus dari hasil pengukuran dan *confirmatory factor analysis* (CFA) untuk menguji suatu kontruk teoritis [22]. Teknik ini digunakan untuk memperoleh bukti validitas konstruk dan reliabilitas instrumen yang digunakan dalam penelitian. Variabel laten yang digunakan dalam penelitian ini dibentuk dengan beberapa *observed variable* atau indicator. Analisis ini digunakan untuk menguji apakah indicator-indikator yang digunakan merupakan indicator yang valid dan reliabel sebagai pengukur variabel laten. Validitas dalam analisis konfirmatori ini adalah validitas konstruk, dimana mengukur sejauh mana ukuran indikator tersebut mampu merefleksikan konstruk laten teorinya yang memberikan kepercayaan ukuran indicator dari sampel. Semua proses analisis data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak AMOS versi 24 [22]. Analisis SEM dilakukan untuk menguji model yang diajukan dalam penelitian. Beberapa kriteria yang digunakan untuk menilai apakah model sudah fit atau tidak adalah: hasil uji kai kuadrat (χ^2), perbandingan kai kuadrat dengan derajat kebebasan atau db (χ^2/db), Comparative Fit Index (CFI), Root Mean Square Error Approximation (RMSEA), dan Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) [23]. Model dapat diterima apabila nilai χ^2/db tidak lebih dari 3, CFI di atas 0,90 atau lebih diharapkan mencapai 0,95 atau lebih, RMSEA kurang dari 0,06, dan SRMR kurang dari 0,09 [24].

BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian

5.1.1 Deskripsi Hasil Studi Pendahuluan

5.1.1.1 Profil Masyarakat Miskin di Kota Semarang

Aspek penekanan pembangunan saat ini selain pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, masalah kemiskinan dan pemerataan pembangunan juga menjadi isu nasional yang cukup hangat. Analisis mengenai dua hal terakhir tersebut mendapat perhatian luas dari berbagai kalangan Masalah kemiskinan dan pemerataan menjadi suatu hal yang sangat urgen untuk ditelaah sampai seberapa jauh dampaknya. Sehubungan dengan hal tersebut, prioritas untuk memerangi kemiskinan dengan mencari atau mengamati kemiskinan harus dilakukan secara serius dan terpadu, sehingga komitmen pemerintah untuk mengurangi penduduk miskin dapat terwujud. Komitmen pemerintah tersebut bukan hanya direalisasikan secara langsung oleh pemerintah pusat, namun juga harus diikuti oleh pemerintah daerah begitupun dengan kota Semarang.

Perkembangan tingkat kemiskinan di Kota Semarang kurun waktu 2014 – 2018 telah menunjukkan penurunan dari 84,7 ribu jiwa menjadi hanya 73,6 ribu jiwa pada tahun 2018. Jika dilihat persentase penduduk miskin di Kota Semarang, jelas terlihat penurunannya, penduduk miskin pada tahun 2014 sebesar 5,04 persen turun secara signifikan menjadi hanya 4,14 persen pada tahun 2018. Penduduk miskin pada tahun 2018 menurun menjadi 73,6 ribu jiwa atau dengan persentase penduduk miskinnya sebanyak 4,14 persen. (BPS, 2018)

Tabel 5.1 Perkembangan Kemiskinan Kurun Waktu Tahun 2014-2018

Tahun	P1	P2	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)
2014	0,47	0,08	348.824
2015	0,50	0,09	368.477
2016	0,76	0,18	382.160
2017	0,54	0,12	402.297
2018	0,58	0,15	427.511

Sumber: BPS RI

Status Kepemilikan Rumah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan terdapat 82,173% berstatus milik sendiri, dan 17,837% berstatus milik orang lain (kontrak). Orang miskin dengan kepemilikan rumah berstatus milik sendiri sebagian besar adalah berasal dari warisan atau hibah orang tua. Sedangkan orang miskin dengan kepemilikan rumah berstatus kontrak adalah mereka yang harus membayar tahunan atau bulanan, bahkan ada sebagian yang hanya mengontrak satu paviliun, atau hanya satu kamar tidur saja, kurang lebih Rp 300.000,00 per bulan.

Kondisi Rumah

Kondisi rumah yang ditempati oleh responden, yang terbesar berukuran 6 x 8 m², sedang yang terkecil berukuran 3 x 10 m². Secara umum kondisi rumah responden dibedakan menjadi dua yaitu kondisi rumah dengan katagori layak dan kondisi rumah dengan katagori belum layak. Orang miskin yang rumahnya belum layak mencapai 65,873% (lihat Tabel 4.3).

Responden yang menyatakan rumahnya belum layak adalah mereka yang menghuni rumah dengan kondisi dinding rumah separuh terbuat dari tembok dan separuh lagi berdinding papan. Separuh dinding yang terbuat dari tembok pada umumnya belum diplester (kalaupun sudah diplester, warna catnya sudah kusam, bahkan hanya di cat dengan kalkarium), sedang dinding yang rumahnya separuh terbuat dari papan, rata-rata sudah rapuh dan berlubang. Selain itu juga terdapat rumah yang dindingnya hanya terbuat dari papan kalimantan atau kayu sengon yang sudah rapuh dan berlubang sehingga di malam hari terasa dingin dan banyak nyamuk.

Kondisi rumah orang miskin, dilihat dari indikator kelengkapan kamar mandi dan WC pada umumnya belum sesuai dengan aturan sanitasi, karena lantai kamar mandi yang dimiliki responden belum keramik, bahkan hanya plesteran biasa, termasuk bak mandinya, serta ada sebagian yang tidak memiliki bak mandi dan hanya menggunakan ember besar. Sedang yang rumahnya berada di bantaran sungai, WC-nya langsung dibuang ke sungai sehingga apabila dipandang rumah tersebut tampak buruk, tidak rapi, dan tidak bersih bahkan bisa dikategorikan kumuh.

Dari penelitian di lapangan menunjukkan 34,127% responden beranggapan bahwa kondisi rumahnya sudah layak untuk dijadikan tempat tinggal (hunian), walaupun dengan indikator yang sangat minimum yaitu “apabila hujan tidak keujanan dan apabila panas tidak kepanasan”. Responden pun juga menyatakan dan menganggap tempat tinggalnya sudah memenuhi syarat rumah sehat walaupun sebenarnya tidak tampak indah dan rapi seperti yang dikatakan oleh bapak Sugeng (tahun 2017)

“Nek menurut kulo, griyo niki nggih sampun sae, sebab menawi panas mboten kepanasan, lan menawi jawah inggih mboten kejawahan tur mboten bocor”

(Artinya “Kalo menurut saya, rumah ini ya sudah baik, sebab kalau panas tidak kepanasan, dan kalau hujan juga tidak keujanan dan tidak bocor”).

Ungkapan pak Sugeng cukup sederhana, artinya bahwa orang miskin menyadari tentang kondisi ekonominya yang lemah, sehingga dia merasakan kenyamanan tinggal di rumah. Tetapi ada sebagian responden yang mengatakan rumahnya tidak layak, seperti yang diungkapkan pak Robito (tahun 2010):

“Nggih mboten layak pak, lha wong nek jawah mawon kebocoran, dindingipun tasih bolong-bolong, angine nek ndalu mlebet, rasane niku atis, nek umpami onten arto ngih pengene-pun dandosi, kersane rapet, tapi arto king pundi pak, wong damel maem mawon kadang tasih kirang, keperluan sekolah anak mawon kadang mboten saget maringi arto”.

(Artinya: “ Ya tidak layak pak, karena kalau hujan kebocoran, dindingnya masih banyak lubang, udaranya kalau malam masuk, dan kalau punya uang ada keinginan untuk memperbaiki, biar tertutup rapat, tapi uang dari mana pak, untuk makan saja terkadang masih kurang, dan untuk keperluan pendidikan anak kadang-kadang tidak mampu membayar”).

Status Kepemilikan Tanah

Pada umumnya status kepemilikan tanah yang ditempati oleh orang miskin di Kota Semarang menunjukkan bahwa 69,293% merupakan hak milik, dan 30,707% adalah milik negara. Pemanfaatan tanah negara disebabkan ketidakmampuan membeli rumah atau tanah di perkotaan karena harga tanah atau rumah cukup mahal apalagi di Semarang Bawah. Bagi

responden yang tanahnya berstatus Hak Milik, berasal dari warisan orang tua atau hibah, sedang yang status tanahnya milik negara (secara umum tinggal dibantaran sungai) adalah milik Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan mereka kebanyakan pendatang yang sudah menjadi penduduk kota Semarang.

Aset

Aset yang dimiliki oleh responden masih sangat minim atau sederhana, seperti yang dinyatakan oleh 82,173% responden. Tingkat kesederhanaan tersebut terlihat dari kepemilikan perabot rumah tangga seperti meja dan kursi tamu yang hanya terbuat dari kayu kalimantan bahkan sudah banyak yang rusak dengan warna kayu sudah kusam.

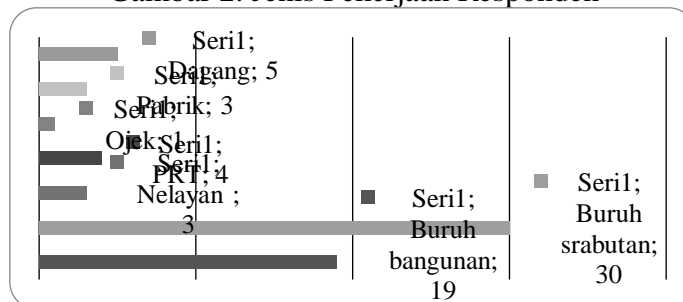
Harta benda lainnya yang dimiliki responden adalah televisi yaitu 92,673% responden memiliki televisi berukuran 14 inci dan 7,328% responden memiliki televisi berukuran 21 inci. Akan tetapi, mayoritas televisi yang dimiliki adalah berasal dari produksi Cina seperti HAITCH, NIKO dengan harga berkisar Rp. 400.000,00. Hanya sebagian kecil yang memiliki televisi produksi Jepang seperti SHARP, TOSHIBA, SONY. Responden yang membeli TV merk Cina beranggapan bahwa, produk Cina memiliki harga yang lebih murah dibandingkan TV produksi Jepang ataupun Eropa, dan apabila dilihat dari hasil gambar dan warna, produksi Cina juga tidak kalah jernih bila dibandingkan dengan produksi Jepang atau Eropa. Orang miskin selain memiliki harta benda berupa meja kursi tamu serta asset seperti TV, 100% responden juga memiliki almari walupun sangat sederhana, karena hanya terbuat dari papan kalimantan bahkan ada yang sebagian dari bahan tripleks (bukan dari bahan kayu jati) dan plastic.

Jenis Pekerjaan

Dilihat dari indikator jenis pekerjaan, sebesar 87% responden menyatakan tidak memiliki pekerjaan tetap. Apa yang dilakukan setiap harinya tidak menentu (terkadang bekerja dan terkadang tidak atau sering disebut setengah pengangguran), seperti buruh bangunan, buruh serabutan, tukang ojek, nelayan, serta hanya membantu tetangga apabila dibutuhkan. Sedangkan untuk mencukupi kebutuhan pokok masih banyak dibantu oleh istri yang bekerja di pabrik, maupun pekerjaan lain seperti pembantu rumah tangga, tukang pijat, atau berjualan seperti nasi pecel keliling, warung sederhana. Untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, tidak jarang responden mengandalkan bantuan dari saudara yang memiliki status ekonomi lebih mampu, bahkan ada juga yang sampai harus berhutang kepada tetangga, ataupun meminjam kredit dari perbankan dan hal ini dirasa sangat memberatkan.

Dari hasil penelitian di lapangan menunjukkan 12,13% responden memiliki pekerjaan tetap yaitu bekerja pabrik, dagang, dengan bekal pendidikan yang dimiliki SMP dan SMA, tetapi dari hasil bekerja juga tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, karena upah atau hasil yang diterima sedikit atau tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Adapun jenis pekerjaan masyarakat miskin terdapat pada gambar berikut ini:

Gambar 2. Jenis Pekerjaan Responden



Pola Pendapatan dan Pengeluaran Responden

Pendapatan

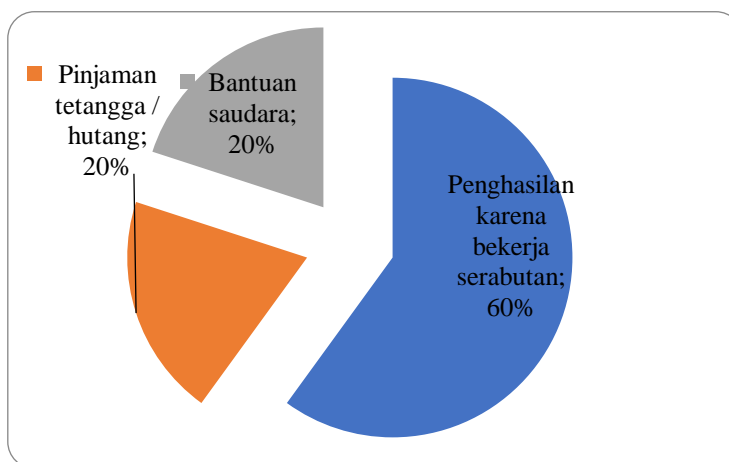
Pendapatan per bulan bagi responden rata-rata mencapai Rp 400.000,00 sampai dengan Rp 700.000,00. Pendapatan tersebut merupakan total dari penghasilan yang diterima orang tua tanpa melibatkan anak karena mereka sebagian besar masih sekolah dan walaupun bekerja dengan penghasilan yang sangat minimum.

Berdasar hasil wawancara di lapangan, responden menyatakan besarnya pendapatan tersebut ada yang sudah mencukupi dan ada yang masih defisit. Kondisi defisit keuangan yang dialami responden berusaha ditanggulangi dari bantuan dari keluarga, meminjam pada tetangga atau bank kredit.

“Nggih kangge mencukupi kebutuhan, kadang kulo dibantu sederek utawi pados ampilan dateng tetanggi” seperti ungkapan Ibu Rubiyati (2010)

Adapun pola proporsi sumber pendapatan dapat digambarkan dalam Gambar di bawah ini

Gambar 3. Proporsi Pendapatan Responden



Sumber : Data primer diolah, 2020

Pengeluaran

Pengeluaran per minggu bagi responden diperuntukkan untuk mencukupi kebutuhan makanan dan non makanan sebagaimana terlihat pada Tabel 4.4

Tabel 5. Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Keluarga Miskin / Minggu

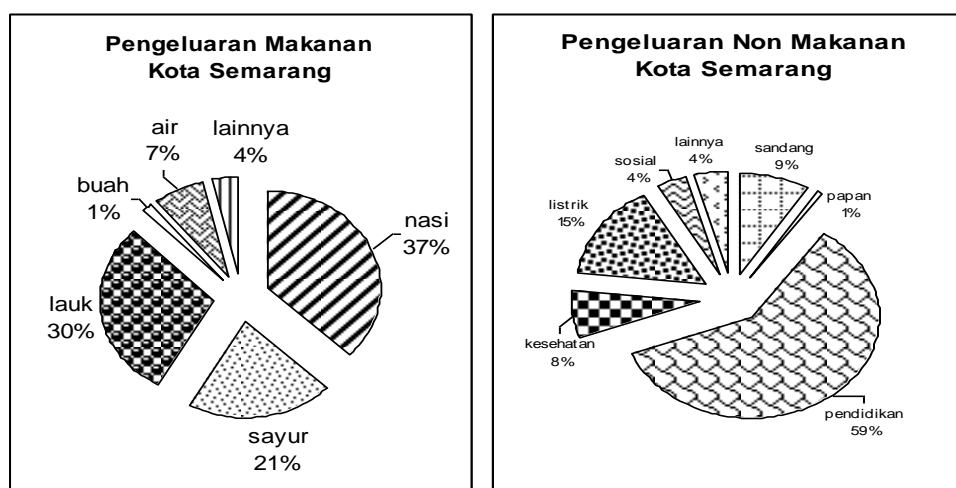
No.	Pengeluaran	SMG Utara n=40	SMG Tengah n=40	Gajah Mungkur n=45	Jumlah n=125
1	Nasi	38,41%	34,49%	33,68%	35,53%
2	Sayur	21,29%	22,04%	23,25%	22,19%
3	LP	29,38%	32,21%	34,77%	32,12%
4	Buah	1,72%	1,28%	0,99%	1,33%
5	Air minum	6,32%	7,81%	1,64%	5,26%
6	Lainnya	2,88%	2,17%	5,66%	3,57%
1	Sandang	11,99%	10,40%	7,76%	10,05%
2	Papan	0,56%	0,00%	0,89%	0,48%
3	Pendidikan	70,19%	67,28%	17,15%	51,54%
4	Kesehatan	7,85%	6,79%	9,38%	8,06%
5	Listrik	85,82%	91,96%	88,15%	88,64%
6	Sosial	4,43%	5,37%	4,74%	4,84%
7	Lainnya	4,01%	5,07%	4,34%	4,47%

Sumber : data primer diolah, 2020

Pengeluaran responden untuk konsumsi makanan hanya difokuskan pada nasi, sayur dan lauk pauk (seperti tahu, tempe dan kadang-kadang ikan), sedang untuk keperluan buah-buahan belum dipikirkan, hanya berkisar 1,33%. Pengeluaran responden untuk aspek non makanan bagi orang miskin di kota Semarang, hanya difokuskan pada sandang, papan, dan pendidikan, sedang untuk keperluan kesehatan dan rekreasi belum dipikirkan sama sekali.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa responden (kelompok miskin dan menganggur) masih cenderung mengutamakan “kekenyangan perut” tanpa memperhatikan aspek keseimbangan gizi yaitu terlihat dari ketidakperhatian mereka terhadap kebutuhan mengkonsumsi buah-buahan yang proporsinya sangat kecil. Sedangkan dari aspek non makanan, menunjukkan responden kurang memperhatikan kebutuhan perumahan dan rekreasi, akan tetapi proporsi pengeluaran mereka untuk pendidikan justru paling tinggi dibanding aspek lainnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa dengan proporsi pengeluaran untuk pendidikan yang besar justru sebagian besar dari mereka termasuk kategori miskin dan menganggur. Menurut wawancara di lapangan, menunjukkan bahwa pendidikan yang dibayar mahal oleh orang tuanya, kurang dapat dimanfaatkan oleh anaknya secara maksimal. Orang tua (responden miskin menganggur) berusaha menjadikan anaknya untuk lebih baik daripada mereka melalui sarana pendidikan. Berikut proporsi pengeluaran untuk makanan dan nonmakanan, sebagaimana Gambar 4.4

Gambar 4. Proporsi Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Responden



Sumber : data primer, 2020

Pengangguran

Pengangguran, menurut persepsi responden adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali atau tidak memiliki pekerjaan tetap, bahkan berdiam diri di rumah. Hasil penelitian menunjukkan 60,52% responden termasuk dalam kategori pengangguran terbuka yaitu termasuk orang yang masih mencari pekerjaan, baik yang mencari pekerjaan pertama kali maupun yang pernah bekerja sebelumnya; dan 39,48% termasuk setengah pengangguran. Seratus persen responden mengatakan menganggur dikarenakan sulitnya mencari lapangan kerja atau tidak memiliki jaringan kerja. Pada dasarnya orang miskin sudah pernah berusaha untuk mencari pekerjaan, namun selalu gagal. Menganggur bukan karena sebuah pilihan, tetapi karena sempitnya lapangan kerja, itu terbukti seperti yang dikatakan oleh Yoyok bahwa dia sudah pernah menjadi tukang parkir di jalanan walaupun dia berpendidikan SMK (Tahun 2017).

“Kulo niku kerjo nopo mawon purun kok pak, mboten pilih-pilih, wong kulo inggih pernah dados tukang parkir teng warung penyet wingking griyone kulo”

Artinya, Saya itu kerja apa saja mau pak, tidak pilih-pilih, saya pernah jadi tukang parkir di warung penyet belakang rumah saya.

Dari profil kemiskinan (nonfisik) di wilayah penelitian yaitu kecamatan Semarang Barat, Semarang Timur, Semarang Utara, Semarang Tengah, dan Gajahmungkur memberikan suatu gambaran seperti Tabel berikut :

Tabel 6. Profil Kemiskinan Non Fisik di Kota Semarang

No.	Indikator	Smg Utara n=40	Smg Tengah n=40	Gajah mungkur n=45	Jumlah n=125
1.	Pekerjaan tetap	10%	20%	15%	15%
	Tidak bekerja tetap	87%	85%	83%	85%
2.	Pendapatan / bulan	400.000-700.000	400.00-700.000	400.00-700.000	400.000-700.000
	Pengeluaran / bulan	700.00-1.000.000	600.00-800.000	500.00-900.000	500.000-1.000.000
3.	Pengangguran terbuka	57,14%	58,62%	65,52%	60,52%

	Setengah pengangguran	42,86%	41,38%	34,48%	39,48%
--	-----------------------	--------	--------	--------	--------

*) Keterangan :

- a. Tidak memiliki pekerjaan tetap, srabutan
- b. Pengangguran terbuka, tidak bekerja sama sekali

Hasil wawancara dan observasi pada masyarakat miskin kota Semarang diperoleh informasi meliputi (1). Menurut persepsi responden, miskin didefinisikan orang yang tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. sedang pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali atau berdiam diri di rumah, dan walaupun bekerja tidak menetap. (2). 34,127% responden beranggapan bahwa kondisi rumahnya sudah layak untuk dijadikan tempat tinggal (hunian), walaupun dengan indikator yang sangat minimum yaitu “apabila hujan tidak keujanan dan apabila panas tidak kepanasan. (3). Tempat tinggalnya sudah memenuhi syarat rumah sehat walaupun sebenarnya tidak tampak indah dan rapi. (4). Menganggur bukan karena berpendidikan rendah (60,54%, berpendidikan SMK/SMA) dan menganggur juga bukan karena tidak memiliki keterampilan dan tidak melakukan usaha mandiri bukan karena tidak memiliki jiwa wiraswasta semata, melainkan ketiadaan modal untuk melakukan usaha mandiri.

5.1.2 Desain Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan Berbasis Work Superior Competence melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Pengembangan desain model pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan berbasis work superior competence melalui pusat kegiatan belajar di Kota Semarang ini mengacu pada kebutuhan masyarakat dalam menjawab tantangan-tantangan di dunia kerja. Hampir setiap lini dunia industry memerlukan tenaga kerja yang memiliki kompetensi unggul. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan sebagai proses penguatan kapasitas (Mardikanto; 2019). Pemberdayaan merupakan hal yang penting dan merupakan hal yang wajib untuk dilakukan mengingat pertumbuhan ekonomi dan teknologi yang demikian pesatnya belakangan ini akan sangat mempengaruhi kemampuan tingkat individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini, pemberdayaan masyarakat memainkan peran untuk memperkuat daya (*bargaining position*) agar masyarakat menjadi lebih mandiri. Yang dimaksud penguatan kapasitas adalah penguatan kompetensi yang dimiliki oleh setiap individu/ kelompok/ organisasi social.

Sliter et al. (2005) menjelaskan, pengertian kompetensi menekankan pada kemampuan orang secara keseluruhan dan juga mengacu pada keahlian yang tepat dan unik untuk organisasi, yang selanjutnya dapat memberikan kompetensi inti dan keunggulan kompetitif bagi organisasi. Kompetensi juga mencakup sifat- sifat pribadi yang dapat dialihkan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Shermon (2004) lebih jauh menguraikan kedua arti tentang kompetensi, baik yang menunjukkan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk efektif dalam melakukan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan, maupun tentang apa yang dibutuhkan seseorang untuk dapat efektif dalam bekerja; saling berhubungan.

Pemberdayaan masyarakat memiliki beberapa prinsip yakni sebagai berikut:

- a. Minat dan Kebutuhan, artinya pemberdayaan akan efektif jika mengacu pada minat dan kebutuhan masyarakat.
- b. Organisasi masyarakat bawah, artinya pemberdayaan akan efektif jika mampu melibatkan/menyentuh organisasi bawah, dimulai dari keluarga.
- c. Keragaman Budaya, artinya pemberdayaan masyarakat harus memperhatikan adanya keragaman budaya. Perencanaan program pemberdayaan harus disesuaikan dengan budaya local yang beragam.

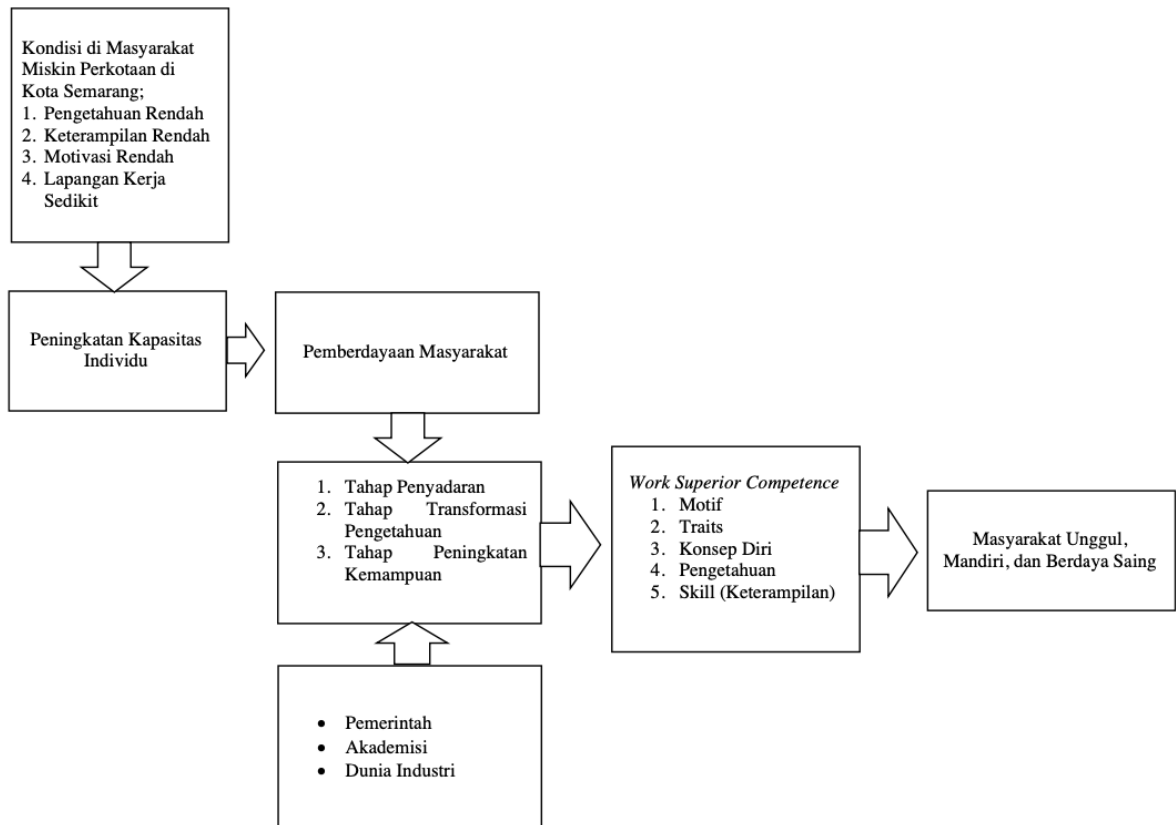
- d. Perubahan budaya, artinya setiap kegiatan pemberdayaan akan mengakibatkan perubahan budaya.
- e. Kerjasama dan partisipasi, artinya pemberdayaan masyarakat hanya akan efektif jika mampu menggerakkan partisipasi masyarakat untuk selalu bekerjasama dalam melaksanakan program-program pemberdayaan yang telah dirancang.
- f. Demokrasi dalam penerapan ilmu, artinya adalah dalam pemberdayaan haruslah selalu memberikan kesempatan kepada masyarakatnya untuk menawarkan setiap ilmu alternatif yang diinginkan.
- g. Belajar sambil bekerja, artinya dalam kegiatan pemberdayaan harus diupayakan agar masyarakat dapat “belajar sambil bekerja” atau belajar dari pengalaman tentang segala sesuatu yang dikerjakan.
- h. Penggunaan metode yang sesuai, artinya program pemberdayaan harus menyesuaikan metode yang digunakan dengan kondisi, kapasitas, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh sasaran pemberdayaan.
- i. Kepemimpinan, artinya penyuluh tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang hanya bertujuan untuk kepentingan/kepuasannya sendiri dan harus mampu mengembangkan jiwa kepemimpinan.
- j. Spesialis yang terlatih, artinya penyuluh harus benar-benar pribadi yang telah memperoleh Latihan khusus tentang segala sesuatu yang sesuai dengan fungsinya sebagai penyuluh.
- k. Segenap keluarga, artinya bahwasanya program pemberdayaan masyarakat harus mampu mengakomodir satu kesatuan dari unit social.
- l. Kepuasan, artinya pemberdayaan masyarakat harus mampu mewujudkan tercapainya kepuasan, khususnya bagi peserta. Dengan tercapainya kepuasan maka akan sangat mungkin untuk terlaksananya program lanjutan yang hasilnya akan lebih baik.

Berdasarkan temuan di lapangan, karakteristik masyarakat miskin yang ada di Kota Semarang termasuk dalam kategori miskin perkotaan. Dimana lapangan kerja di tergolong rendah dan meski bekerjapun mereka terus menerus bekerja di dalam lapangan kerja berproduktivitas rendah sehingga income juga rendah. itu terbukti seperti yang dikatakan oleh Yoyok bahwa dia sudah pernah menjadi tukang parkir di jalanan walaupun dia berpendidikan SMK (Tahun 2017).

“Kulo niku kerjo nopo mawon purun kok pak, mboten pilih-pilih, wong kulo inggih pernah dados tukang parkir teng warung penyet wingking griyone kulo”

Artinya, Saya itu kerja apa saja mau pak, tidak pilih-pilih, saya pernah jadi tukang parkir di warung penyet belakang rumah saya.

Berdasarkan penelitian oleh Sen (1999) kaum miskin perkotaan harus mampu menata diri mereka dengan cara; 1) meningkatkan kualitas diri; 2) Menambah kompetensi; 3) Ikut serta secara aktif dalam proses pembuatan keputusan-keputusan yang akan mempengaruhi hidup mereka. Oleh sebab itu, desain model pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan berbasis work superior competence melalui pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) di Kota Semarang adalah solusi yang telah diberikan. Model desain tersebut digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Desain Model PM Miskin Perkotaan Berbasis Work Superior Competence

Berdasarkan desain model tersebut, program pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan berbasis work superior competence diawali dengan adanya proses identifikasi kondisi masyarakat miskin perkotaan di kota Semarang. Dimana berdasarkan studi pendahuluan didapatkan hasil meliputi rendahnya pengetahuan, keterampilan, dan motivasi masyarakat, hal ini juga disertai dengan kondisi dimana sedikitnya lapangan kerja yang tersedia. Oleh sebab itu, perlunya sebuah peningkatan kapasitas individu melalui pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan adalah sebuah proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transformatif, partisipatif, dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam menangani persoalan dasar yang dihadapi dan meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan harapan. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui 3 tahapan pokok dalam pemberdayaan yang meliputi tahap penyadaran, tahap transformasi pengetahuan dan tahap peningkatan kemampuan. Selain itu juga perlunya peningkatan dan pengembangan kemitraan multistakeholder yang dapat mendukung suksesnya program pemberdayaan masyarakat. komponen-komponen mitra yang dimaksudkan disini adalah antara pemerintah, akademisi dan dunia industry.

Disetiap tahapan-tahapan pemberdayaan perlu memuat indicator-indikator kompetensi unggul yang menurut Spencer 1993 mencakup 5 karakteristik utama meliputi motif, traits, konsep diri, pengetahuan dan keterampilan. Dengan dilakukannya model pemberdayaan berbasis work superior competence ini diharapkan akan terciptanya masyarakat unggul, mandiri dan berdaya saing. Khususnya para warga belajar di pusat kegiatan belajar masyarakat di Kota Semarang.

Dalam penelitian ini, proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pelatihan di PKBM Kota Semarang. Pelatihan yang diambil dalam hal ini adalah pelatihan teknik otomotif kendaraan ringan. Pelatihan ini dipilih sebagai jawaban atas kebutuhan warga belajar yang

memang mayoritas laki-laki dan sering beraktivitas dijalanan, namun mereka tidak mempunyai keterampilan dan pengetahuan terkait perbengkelan. Oleh sebab itu untuk meningkatkan kapasitas individu, pihak PKBM menginisiasi pelatihan dengan menggunakan desain pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan berbasis *work superior competence* melalui pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) di Kota Semarang.

Proses pemberdayaan masyarakat diawali dengan sosialisasi program. Kegiatan ini dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran. Baik kesadaran akan permasalahan yang saat ini tengah mereka alami, dan penyadaran akan pentingnya program pelatihan tersebut untuk warga belajar nantinya. Tahap pertama atau tahap penyadaran dan pembentukan perilaku merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pada tahap ini peneliti berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Apa yang diintervensi dalam masyarakat sesungguhnya lebih pada kemampuan afektif-nya untuk mencapai kesadaran konatif yang diharapkan. Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran masyarakat tentang kondisinya saat itu, dan dengan demikian akan dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

Kemudian pada tahap kedua yaitu proses transformasi pengetahuan warga belajar akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan-keterampilan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan yang saat ini warga belajar alami. Keadaan ini akan menstimulasi terjadinya keterbukaan wawasan dan menguasai kecakapan keterampilan dasar yang mereka butuhkan. Pada tahap ini masyarakat hanya dapat memberikan peran partisipasi pada tingkat yang rendah, yaitu sekedar menjadi pengikut atau obyek pemberdayaan.

Tahap ketiga adalah merupakan tahap pengayaan atau peningkatan intelektualitas dan kecakapan-keterampilan yang diperlukan, supaya mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai oleh kemampuan masyarakat di dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi, dan melakukan inovasi-inovasi di dalam lingkungannya. Apabila masyarakat telah mencapai tahap ketiga ini maka masyarakat dapat secara mandiri melakukan pembangunan. Dalam konsep pembangunan masyarakat pada kondisi seperti ini seringkali didudukkan sebagai subyek pembangunan atau pemeran utama. Pemerintah tinggal menjadi fasilitator saja.

Pada setiap tahapan, diberikan muatan-muatan yang dapat menstimulus berkembangnya *work superior competence* seperti internalisasi dalam motif, motif dapat dikatakan sebagai hal-hal yang secara konsisten dipikirkan orang atau diinginkan seseorang yang membuatnya mengambil suatu tindakan. Motif menyetir, mengarahkan dan memilih perilaku untuk mengambil tindakan tertentu atau mencapai tujuan tertentu dibandingkan dengan yang lain-lain. Kedua, trait yaitu karakteristik fisik dan respon yang konsisten terhadap berbagai situasi dan informasi. Ketiga, konsep diri, yaitu sikap, nilai-nilai dan citra diri seseorang. Keempat, pengetahuan, yaitu informasi yang dimiliki seseorang di suatu bidang tertentu. Pengetahuan merupakan kompetensi yang kompleks. Kelima, skill atau ketrampilan, yaitu kemampuan untuk menampilkan suatu tugas fisik atau mental.

5.1.3 Kelayakan Desain Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan Berbasis Work Superior Competence melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Model pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan setelah selesai dikembangkan kemudian dilakukan penilaian atau uji validasi ahli dengan menggunakan instrumen tertutup yang dikombinasikan dengan angket terbuka untuk mendapatkan saran dan masukan. Ahli ini diminta memberikan saran perbaikan secara umum terhadap prototipe model pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan ini. Penilaian yang dilakukan oleh ahli pemberdayaan yaitu Prof.

Dr. Joko Sutarto, Msi. Guru besar Jurusan Pendidikan Nonformal dari Universitas Negeri Semarang dan Prof. Dr. Joko Sutarto, M.Pd guru besar Jurusan Pendidikan Nonformal dari Universitas Negeri Semarang untuk mendapatkan masukan dan saran perbaikan dari pakar. Pada tahapan setelah validasi praktisi dilakukan untuk menilai prototipe model pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan oleh praktisi Pemberdaya Masyarakat yaitu Tugiman, S.Sos (lampiran). Hasil penilaian validator ahli tentang prototipe model pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan disajikan pada table berikut.

Tabel 5.6 Hasil Penilaian Validator Ahli Pemberdayaan Masyarakat

NO	Aspek	Skor			Rata-Rata
		Ahli 1	Ahli 2	Ahli 3	
Aspek Kemudahan Pemahaman Isi Buku					
Kemudahan pemahaman atau kejelasan yang mencakup:					
1	Menciptakan tim kecil bagi perencana pemberdayaan	3	3	3	3
2	Mengidentifikasi atau menetapkan kelompok belajar	3	3	4	3,33333333
3	Seleksi dan melatih fasilitator kelompok	3	3	3	3
4	Mengaktifkan kelompok belajar	4	4	4	4
5	Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan fasilitator	3	3	3	3
6	Mendukung kegiatan kelompok sesuai motif dan peluang	3	3	3	3
7	Meningkatkan karakteristik fisik peka situasi dan informasi	4	3	4	3,66666667
8	Meningkatkan konsep diri sebagai pekerja kompetensi unggul	3	4	4	3,66666667
9	Meningkatkan pengetahuan sebagai pekerja kompetensi unggul	3	3	3	3
10	Meningkatkan multi kompetensi unggul sebagai pekerja	3	4	4	3,66666667
11	Meningkatkan hubungan diantara kelompok	4	3	3	3,33333333
Aspek Kemudahan Penerapan Isi Buku					
Kemudahan penerapan meliputi:					
1	Menciptakan tim kecil bagi perencana pemberdayaan	3	3	3	3
2	Mengidentifikasi atau menetapkan kelompok belajar	4	4	3	3,66666667
3	Seleksi dan melatih fasilitator kelompok	3	3	3	3
4	Mengaktifkan kelompok belajar	3	3	4	3,33333333

5	Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan fasilitator	4	3	3	3,33333333
6	Mendukung kegiatan kelompok sesuai motif dan peluang	3	3	3	3
7	Meningkatkan karakteristik fisik peka situasi dan informasi	4	4	3	3,66666667
8	Meningkatkan konsep diri sebagai pekerja kompetensi unggul	3	3	4	3,33333333
9	Meningkatkan pengetahuan sebagai pekerja kompetensi unggul	3	3	4	3,33333333
10	Meningkatkan multi kompetensi unggul sebagai pekerja	3	3	4	3,33333333
11	Meningkatkan hubungan diantara kelompok	4	3	3	3,33333333
Aspek Kebermanfaatan Isi Buku					
Kebermanfaatan produk diantaranya:					
1	Menciptakan tim kecil bagi perencana pemberdayaan	4	4	4	4
2	Mengidentifikasi atau menetapkan kelompok belajar	3	3	4	3,33333333
3	Seleksi dan melatih fasilitator kelompok	3	4	4	3,66666667
4	Mengaktifkan kelompok belajar	3	3	3	3
5	Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan fasilitator	3	4	4	3,66666667
6	Mendukung kegiatan kelompok sesuai motif dan peluang	4	4	4	4
7	Meningkatkan karakteristik fisik peka situasi dan informasi	3	3	3	3
8	Meningkatkan konsep diri sebagai pekerja kompetensi unggul	4	4	4	4
9	Meningkatkan pengetahuan sebagai pekerja kompetensi unggul	3	4	4	3,66666667
10	Meningkatkan multi kompetensi unggul sebagai pekerja	4	4	4	4
11	Meningkatkan hubungan diantara kelompok	3	4	3	3,33333333
Skor Total		110	112	116	112,7
Persentase		83,3	84,8	87,9	85,4

Berdasarkan Tabel 8. diketahui bahwa persentase penilaian pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan berbasis *work superior competence* pada ahli 1 sebesar 83,3%, ahli 2 sebesar 84,8%, dan ahli 3 sebesar 87,9%. Rata-rata persentase ketiga ahli pemberdayaan masyarakat

sebesar 85,4%. Berdasarkan persentase penilain hasil tersebut berada pada kategori dan kriteria sangat tinggi begitu juga dengan nilai rata-rata dari ketiga validator ahli sehingga dapat dikatakan bahwa prototipe model pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan berbasis work superior competence ini sangat layak untuk diujicobakan.

Saran dan masukan yang diberikan oleh ketiga ahli pemberdayaan masyarakat dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Secara buku panduan prototipe model pemberdayaan masyarakat miskin kota berbasis work superior competence sudah baik, namun masih ada beberapa hal yang perlu direvisi sesuai yang disarankan dan masukan dari para ahli. 2) Prototipe model pemberdayaan masyarakat miskin kota berbasis work superior competence pada langkah-langkah peningkatan kemampuan perlu diuraikan lebih rinci lagi, dan perlu dicek lagi kesesuaian tiap pokok bahasan.

5.2 Pembahasan

Model pemberdayaan masyarakat miskin kota berbasis work superior competence berdampak baik untuk diterapkan sesuai penilaian yang diperoleh dari tahapan pengembangan. Hasil tersebut relevan dengan pernyataan oleh Mulyono (2012), Hostter (2013) dan bisa ditetapkan sebagai model sebagaimana yang diungkapkan oleh Hostter (2013), menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat membutuhkan komitmen yang tinggi oleh pekerja social (agen pembaharu) dan itu memiliki dampak atau pengaruh positif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Tjokowinoto (1998), mengatakan tentang Strategi Pengentasan Kemiskinan bahwa partisipasi masyarakat local akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan pemberdayaan masyarakat

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian di atas, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 6.1.1 Profil masyarakat miskin adalah kondisi rumah belum layak karena ukuran rumah kecil, dinding terbuat dari separuh tembok separuh papan bahkan ada yang hanya dari papan dan tripleks, sedang lantai terbuat dari plesteran bukan dari tanah atau ubin, asset yang dimiliki sangat sederhana seperti meja kursi tamu, almari pakaian, serta televisi 14 inci dan 21 inci, kebutuhan air bersih dari sumur, pendapatan rendah, pekerjaan tidak tetap bahkan menganggur, pengeluaran tidak sebanding dengan pendapatan.
- 6.1.2 Pengembangan model pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan berbasis work superior competence ini dikembangkan dengan desain pemberdayaan masyarakat dan kompetensi unggul.
- 6.1.3 Persentase penilain hasil penilaian ketiga validator berada pada kategori atau kriteria sangat tinggi sehingga dapat dikatakan bahwa prototipe model pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan berbasis work superior competence ini sangat layak untuk diujicobakan.

6.2 Saran

- 6.2.1 Miskin dan manganggur perlu menambah keilmuan khususnya dibidang keterampilan, agar mereka dapat memiliki skills dan sekaligus mampu meningkatkan ekonominya.
- 6.2.2 Model pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan berbasis work superior competence melalui kegiatan di PKBM lebih ditekankan pada proses pembelajaran keterampilan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Martinez and F. Perales, "The Dynamics of Multidimensional Poverty in Contemporary Australia," *Soc. Indic. Res.*, vol. 130, no. 2, pp. 479–496, 2017.
- [2] R. Lister, *Poverty*. Cambridge: Polity Press, 2004.
- [3] M. Thohir, "Memahami Kemiskinan," *J. Dewan Ris. Drh. Jawa Teng.*, vol. 4, no. 1, 2008.
- [4] BPS Jawa Tengah, "Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2018," Semarang, 2018.
- [5] BPS Kota Semarang, "Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Semarang 2019," 2019.
- [6] M. Ravallion, *Regional Seminar on Definitions and Measurement of Urban Poverty*. Bangkok, Thailand, 2010.
- [7] D. A. Kotzé, "Contradictions and assumptions in community development," *Community Dev. J.*, vol. 22, no. 1, pp. 31–35, 1987.
- [8] A. Sen, *Development as Freedom*. New York, 1999.
- [9] R. M. Van Voorhis and C. Hostetter, "The impact of MSW education on social worker empowerment and commitment to client empowerment through social justice advocacy," *J. Soc. Work Educ.*, vol. 42, no. 1, pp. 105–121, Jan. 2006.
- [10] T. Shildrick and R. MacDonald, "Poverty talk: How people experiencing poverty deny their poverty and why they blame 'the poor,'" *Sociol. Rev.*, vol. 61, no. 2, pp. 285–303, 2013.
- [11] J. McArdle, "Community development tools of trade," *Community Q.*, vol. 16, pp. 47–54, 1989.
- [12] Kalleberg, *Research on Future Skill Demands*. Washington, D.C.: National Academies Press, 2008.
- [13] S. E. Mulyono, "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat Miskin Perkotaan Melalui Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kebutuhan Pasar," Semarang, 2019.
- [14] A. Muslim, R. Karsidi, M. Wijaya, and H. Joebagio, "A Mosque-Based Economic Empowerment Model for Urban Poor Community," *Int. J. Soc. Sci. Res.*, vol. 2, no. 2, p. 80, 2014.
- [15] J. R. Belcher and R. L. Hegar, "Social work and the casualties of capitalism: Empowerment of the urban poor," *J. Progress. Hum. Serv.*, vol. 2, no. 1, pp. 39–53, 1991.
- [16] W. S. Handapangoda and A. S. Kumara, "The World at Her Fingertips?: Examining the Empowerment Potential of Mobile Phones among Poor Housewives in Sri Lanka," *Gend. Technol. Dev.*, vol. 17, no. 3, pp. 361–385, 2013.
- [17] I. Malaque, K. Bartsch, and P. Scriver, "Thriving in the slums: progressive development and empowerment of the urban poor to achieve secure tenure in the Philippines," *Archit. Sci. Rev.*, vol. 61, no. 5, pp. 313–318, 2018.
- [18] P. D. Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. 2016.
- [19] N. Bennett, W. R. Borg, and M. D. Gall, "Educational Research: An Introduction," *Br. J. Educ. Stud.*, 1984.
- [20] W. R. Gall, M. D., Gall, J. P., & Borg, *Educational research: An introduction (7th ed.)*. 2003.
- [21] Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/R&D)*. 2016.
- [22] I. Ghozali, "Model Persamaan Struktural. Konsep dan Aplikasi Dengan Program AMOS 24.0. Update Bayesian SEM," in *Model Persamaan Struktural. Konsep dan Aplikasi Dengan Program AMOS 24. Update Bayesian SEM*, 2017.
- [23] G. W. Cheung and R. B. Rensvold, "Evaluating Goodness-of-Fit Indexes for Testing

- Measurement Invariance,” *Struct. Equ. Model.*, vol. 9, no. 2, pp. 233–255, 2002.
- [24] L. T. Hu and P. M. Bentler, “Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives,” *Struct. Equ. Model.*, vol. 6, no. 1, pp. 1–55, 1999.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran A. Instrumen Studi Pendahuluan

RESPONDEN

MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN BERBASIS *WORK SUPERIOR COMPETENCE* MELALUI PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DI KOTA SEMARANG

MODEL STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BERBASIS PANGSA PASAR DI PKBM KOTA SEMARANG JAWA TENGAH

INSTRUMEN PENELITIAN

1. Nomor Responden	
2. Nama Responden	
3. Umur	
4. Kalurahan	
5. Kecamatan	
6. Kota	Semarang
7. Enumerator	

SOSIAL EKONOMI

1. Pendidikan	
2. Pekerjaan	
3. Pekerjaan sampingan	
4. Pendapatan	
5. Pengeluaran	

A. IDENTITAS RUMAH TANGGA

No	Nama	Status	Kelamin (L/P)	Umur (tahun)	Pendidikan (tahun)	Pekerjaan Utama	Pekerjaan sampingan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

Kode kolom 3 :

1. istri
2. anak
3. menantu
4. cucu

Kode kolom 7 dan 8 :

1. Petani
2. Nelayan
3. Buruh tani
4. Buruh industri
6. Pengusaha
7. Pedagang
8. Angkutan
9. PNS
11. Pensiunan
12. Lainnya, sebutkan

5. lainnya, sebutkan 5. Buruh bangunan 10. ABRI

B. PENGELUARAN RUMAH TANGGA (untuk kepala keluarga)

Pengeluaran makanan

Pengeluaran	Per minggu (Rp.)
a. Nasi/makanan pokok	
b. Sayur	
c. Lauk-pauk	
d. Buah	
e. Minuman	
f. Lain-lain	
Jumlah	

Pengeluaran non makanan (untuk kepala keluarga)

Pengeluaran	Per bulan/tahun (Rp.)
a. Sandang	
b. Papan/rumah	
c. Pendidikan	
d. Kesehatan	
e. Listrik	
f. Sosial	
g. Rekreasi	
h. Lain-lain	
Jumlah	

C. PENDAPATAN RUMAH TANGGA (untuk kepala keluarga)

Sumber pendapatan rumah tangga (rata-rata per bulan dalam Rp)

Pekerjaan	Kepala keluarga (pekerjaan; jam kerja/hari; upah/pendapatan)	Istri (pekerjaan; jam kerja/hari; upah/pendapatan)	Anak (pekerjaan; jam kerja/hari; upah/pendapatan)	Lain- lain
1. Utama	a.	a.	a.	
	b.	b.	b.	
	c.	c.	c.	
2. Sampingan	a.	a.	a.	
	b.	b.	b.	
	c.	c.	c.	
3. Tabungan				

Jumlah				
--------	--	--	--	--

Dalam satu minggu bekerjahari

Orang Miskin yang Menganggur

1). Miskin

1. Apa status rumah Bapak/Ibu/Saudara yang ditempati sekarang ini
.....
.....
2. Berapa besar ukuran rumah bapak/ibu/Saudara.....(M2)
3. Terbuat dari bahan apakah dinding rumah Bapak/Ibu/Saudara ?
.....
.....
4. Apa jenis lantai rumah Bapak/Ibu/Saudara.....
5. Menurut bapak/ibu apakah rumah yang ditempati layak ? (beri alasan)
.....
.....
.....
6. Untuk keperluan sehari-hari, Bapak/Ibu/Saudara menggunakan air apa ? dan mengapa ?
.....
.....
.....
7. Apa saja aset yang dimiliki bapak/ibu/Saudara ? (kepala keluarga)
.....
.....
8. Apakah Bapak/Ibu/Saudara secara umum merasa kondisinya kekurangan (bila jawabnya ya), maka beri alasannya.
.....
.....
.....

2). Pengangguran

1. Apakah sekarang ini Bapak/Ibu/Saudara sedang menganggur ? Mengapa, beri alasannya ?
.....
.....
.....
- 2.

Pengangguran	SS	S	TB	TS	STS
a. Saya pernah berusaha mencari pekerjaan					
b. Saya tidak memiliki kemampuan untuk berusaha					
c. Saya menganggur karena sebuah pilihan pekerjaan					
d. Saya menganggur karena tidak memiliki pekerjaan tetap					
e. Saya menganggur karena tidak memiliki keterampilan					

f. Saya menganggur karena tidak memiliki jaringan kerja					
g. saya menganggur karena sudah merasa cukup					
h. Saya menganggur karena berpendidikan rendah					
i. Saya menganggur karena malas bekerja					
j. Saya menganggur karena minimnya potensi yang dimiliki					
k. Saya menganggur karena tidak memiliki jiwa wirausaha					

3. Menurut Bapak/Ibu/Saudara apa definisi pengangguran ? beri penjelasan ?

.....
.....
.....

3. Pemberdayaan berbasis *work superior competence*

1. Apakah Bapak/Ibu/Saudara sudah memiliki keterampilan ? kalau sudah, apa bentuknya ?

.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Mengapa keterampilan Bapak/Ibu/Saudara tidak anda gunakan ?

.....
.....
.....
.....
.....

3. Apa Bapak/Ibu/Saudara ada keinginan untuk diberdayakan ? klo iya, apa bentuknya ?

.....
.....
.....
.....

4. Apakah ada indentifikasi kebutuhan sebelum pemberdayaan dan pelatihan berlangsung.....

.....
.....

5. Apa manfaat pemberdayaan masyarakat bagi saudara ? (diskripsikan)

.....
.....
.....
.....
.....

6. Pengertian pemberdayaan masyarakat menurut Bapak/Ibu/Saudara (diskripsikan)

.....
.....
.....

-
7. Menurut Bapak/Ibu/Saudara jenis usaha apa yang saat ini sedang anda minati ?

8. Menurut Bapak/Ibu/Saudara jenis usaha apa yang saat ini sedang dibutuhkan oleh pasar ?

9. Apa bentuk keterampilan yang diinginkan Bapak/Ibu/Saudara
 a. bengkel Sepeda Motor
 b. Menjahit Garmen
 c. Dagang
 d. Servis Elektronik
 e. Cuci mobil/motor
 f. membuat kue/roti
 g. lainnya (sebutkan)
10. Apabila diadakan pemberdayaan peningkatan kompetensi unggul, apakah Bapak/Ibu/Saudara mau ikut berperan aktif ? (diskripsikan apa yang diperlukan, diminati dan punya prospek pasar)

11. Apakah bapak/ibu bisa mengikuti pemberdayaan dengan baik ?

12. Bagaimana hasil dari pemberdayaan yang bapak/ibu ikuti ?

13. Apakah kegiatan pemberdayaan sesuai motif dan dampak kegiatan dapat membekali sesuai peluang pekerjaan?

14. Apakah kegiatan pemberdayaan meningkatkan karakteristik fisik peka situasi dan informasi?

15. Apakah kegiatan pemberdayaan keningkatkan karakter sebagai pekerja kompetensi unggul?

.....

16. Apakah kegiatan pemberdayaan meningkatkan pengetahuan sebagai pekerja kompetensi unggul?

.....

17. Apakah kegiatan pemberdayaan meningkatkan multi kompetensi unggul sebagai pekerja?

.....

18. Apakah pemberdayaan yang bapak/ibu ikuti dapat menjadikan mata pencaharian (tolong jelaskan mata pencaharian apa) ?

.....

19. Berikut ini ukuran potensi yang dimiliki

Potensi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
.....									
.									
.....									
.									
.....									
.									
.....									
..									

20. Sampai saat ini berapa usia bapak/ibu.....

Ekonomi Masyarakat	SS	S	TB	TS	STS
a. saya memiliki penghasilan yang sangat rendah					
b. sampai saat ini saya tidak berpenghasilan					
c. penghasilan yang saya miliki tidak cukup untuk kehidupan sehari-hari					
d. penghasilan saya < Rp. 500.000,-					
e. penghasilan saya > Rp. 500.000 tetapi < Rp. 1.000.000					
f. penghasilan saya > Rp. 1.000.000					
g. penghasilan saya < Rp. 2.000.000					
h. penghasilan saya <Rp. 2.000.000 s.d. Rp. 5.000.000					
i. Penghasilan saya lebih dari Rp. 5.000.000					

4. Aspek Psikologi/Kelayakan

Berikut ini adalah aspek psikologi/uji kelayakan menurut responden (diisikan oleh enumerator berdasarkan pada hasil wawancara yang telah dilakukan)

Aspek Psikologi	Rangking
A. Aspek Intelegensi	
1. memiliki kecerdasan umum	
2. memiliki kecerdasan verbal	
3. memiliki kecerdasan special	
4. memiliki kecerdasan berpikir mikro	
5. memiliki kecerdasan berfikir makro	
B. Aspek kepribadian	
1. memiliki kesetabilan emosi	
2. memiliki kepercayaan diri yang tinggi	
3. memiliki hibungan social yang baik	
4. memiliki tanggungjawab yang besar	
5. memiliki motivasi berprestasi	
6. memiliki motivasi mentaati aturan	
7. memiliki motivasi untuk memimpin	
8. memiliki motivasi untuk menyesuaikan diri	
9. memiliki komunikasi yang baik	
C. Aspek Kerja	
1. memiliki kecepatan kerja	
2. memiliki ketelitian kerja	
3. memiliki ketekunan kerja	
4. memiliki ketahanan kerja	
5. memiliki inisiatif	
6. suka melakukan kerjasama	

Sumber : Tes uji kelayakan Psikologi dengan modifikasi

Lampiran B. Profil Responden Studi Pendahuluan Lapangan

No.	Profil Responden	SMG Utara n=40	SMG Tengah n=40	Gajah mungkur n=45	Jumlah n=125
1.	Jumlah Anggota Keluarga				
	<4 orang	4	7	9	20
	4 – 5 orang	7	6	5	18
	>5 orang	3	3	1	7
2.	Tingkat Pendidikan				
	SD	3	3	1	7
	SMP	19	14	15	48
	SMA	18	9	12	39
	SMK	9	11	9	29
	Diploma	0	0	0	0
	Sarjana	0	0	0	0
3.	Usia				
	< 20 tahun	15	7	3	25
	20-30 tahun	12	9	10	31
	31-40 tahun	9	14	8	32
	41-50 tahun	9	8	17	34
	51-60 tahun	0	2	1	3
	>60 tahun	0	0	0	0
4.	Jumlah anak				
	belum punya anak	5	2	3	10
	< 2 orang	14	9	12	35
	2 – 3 orang	18	12	14	44
	4 - 5 orang	5	3	1	9
	>5 orang	2	2	1	5

LEMBAR VALIDASI INSTRUMEN
MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN BERBASIS
WORK SUPERIOR COMPETENCE MELALUI PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT (PKBM) DI KOTA SEMARANG

Petunjuk:

1. Berdasarkan pendapat bapak/ibu berilah angka pada item yang sesuai dengan kriteria penelaahan.
 4 = Sangat Baik
 3 = Baik
 2 = Cukup Baik
 1 = Kurang Baik

2. Tabel Penilaian

NO	Aspek	Skala Penilaian			
		1	2	3	4
Aspek Kemudahan Pemahaman Isi Buku					
Kemudahan pemahaman atau kejelasan yang mencakup:					
1	Menciptakan tim kecil bagi perencana pemberdayaan				
2	Mengidentifikasi atau menetapkan kelompok belajar				
3	Seleksi dan melatih fasilitator kelompok				
4	Mengaktifkan kelompok belajar				
5	Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan fasilitator				
6	Mendukung kegiatan kelompok sesuai motif dan peluang				
7	Meningkatkan karakteristik fisik peka situasi dan informasi				
8	Meningkatkan konsep diri sebagai pekerja kompetensi unggul				
9	Meningkatkan pengetahuan sebagai pekerja kompetensi unggul				
10	Meningkatkan multi kompetensi unggul sebagai pekerja				
11	Meningkatkan hubungan diantara kelompok				
Aspek Kemudahan Penerapan Isi Buku					
Kemudahan penerapan meliputi:					
1	Menciptakan tim kecil bagi perencana pemberdayaan				
2	Mengidentifikasi atau menetapkan kelompok belajar				

3	Seleksi dan melatih fasilitator kelompok				
4	Mengaktifkan kelompok belajar				
5	Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan fasilitator				
6	Mendukung kegiatan kelompok sesuai motif dan peluang				
7	Meningkatkan karakteristik fisik peka situasi dan informasi				
8	Meningkatkan konsep diri sebagai pekerja kompetensi unggul				
9	Meningkatkan pengetahuan sebagai pekerja kompetensi unggul				
10	Meningkatkan multi kompetensi unggul sebagai pekerja				
11	Meningkatkan hubungan diantara kelompok				
Aspek Kebermanfaatan Isi Buku					
Kebermanfaatan produk diantaranya:					
1	Menciptakan tim kecil bagi perencana pemberdayaan				
2	Mengidentifikasi atau menetapkan kelompok belajar				
3	Seleksi dan melatih fasilitator kelompok				
4	Mengaktifkan kelompok belajar				
5	Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan fasilitator				
6	Mendukung kegiatan kelompok sesuai motif dan peluang				
7	Meningkatkan karakteristik fisik peka situasi dan informasi				
8	Meningkatkan konsep diri sebagai pekerja kompetensi unggul				
9	Meningkatkan pengetahuan sebagai pekerja kompetensi unggul				
10	Meningkatkan multi kompetensi unggul sebagai pekerja				
11	Meningkatkan hubungan diantara kelompok				

Instrumen Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan Berbasis *Work Superior Competence* Melalui PKBM di Kota Semarang ini dinyatakan:

1. Layak digunakan tanpa revisi
2. Layak digunakan dengan revisi
3. Tidak layak digunakan

Saran:.....
.....
.....
.....
.....

Penyusun

Validator

Dr. Sungkowo Edy Mulyono, M.Si
NIP. 196807042005011001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Gedung Prof. Dr. Retno Sriningsih Satmoko, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229

Telp/Fax (024) 8508087, (024) 8508089

Laman: <http://lppm.unnes.ac.id> Email: lppm@mail.unnes.ac.id

SURAT PERJANJIAN PENUGASAN
PELAKSANAAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
DANA DIPA UNNES TAHUN 2020
Nomor: 23.27.4/UN37/PPK.3.1/2020

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh tujuh bulan April tahun Dua ribu dua puluh, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Dr. Suwito Eko Pramono, M.Pd.** : **Pejabat Pembuat Komitmen** Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang yang berkedudukan di Semarang, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : B/1/UN37/HK/2020 tanggal 2 Januari 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KPA Universitas Negeri Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Dr. Sungkowo Edy Mulyono, S.Pd., M.Si.** : Dosen pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, dalam hal ini bertindak sebagai Pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2020 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

PASAL 1
Dasar Hukum

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada:

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 Nomor 511.
3. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : 302/P/2018 tanggal 26 Juni 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Lembaga dan Pimpinan Pascasarjana Antarwaktu Universitas Negeri Semarang.
4. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/1/UN37/HK/2020 tanggal 2 Januari 2020, tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan / Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2020 Universitas Negeri Semarang.
5. Surat Keputusan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang Nomor : 1315/UN37.3.1/PG/2020, tanggal 24 April 2020, tentang Pemenang Kompetisi Penelitian Tahap II pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNNES
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Semarang (UNNES) Nomor DIPA : SP DIPA-023.17.2.677507/2020, tanggal 27 Desember 2019.

PASAL 2
Ruang Lingkup Perjanjian

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penelitian Pengembangan tahun 2020 dengan judul "MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN BERBASIS WORK SUPERIOR COMPETENCE MELALUI PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DI KOTA SEMARANG"
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya dalam hal diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 3
Dana Penelitian

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebesar **Rp 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah)** sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran UNNES Nomor SP DIPA-023.17.2.677507/2020, tanggal 27 Desember 2019.

PASAL 4
Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana penelitian yaitu 70% x **Rp 70.000.000,- = Rp 49.000.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah)**, yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah mengunggah hasil revisi proposal dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang, RAB, dan instrumen penelitian ke SIPP
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu 30% x **Rp 70.000.000,- = Rp 21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah)**, dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah:
 - (1) Mengunggah catatan harian, laporan kemajuan, atas anggaran yang telah ditetapkan ke SIPP paling lambat tanggal 7 Oktober 2020
 - (2) berkewajiban mengunggah Catatan Harian, Laporan Akhir, dan Laporan Penggunaan Anggaran pada SIPP paling lambat tanggal 13 November 2020
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening BNI atas nama Dr. Sungkowo Edy Mulyono, S.Pd., M.Si. dengan nomor rekening 0246561251

Pasal 5
Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak **Tanggal 27 April 2020** dan berakhir pada **Tanggal 13 November 2020**.

Pasal 6
Target Luaran

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target 1 (satu) luaran wajib dan 1 (satu) luaran tambahan seperti tersebut di bawah:
 - a. Artikel di Jurnal Internasional bereputasi Terindeks pada database International bereputasi (accepted/published)
 - b. Kekayaan Intelektual berupa merk dagang/desain industri (bukti pendaftaran)
 - c. Prototipe industri dan profilnya atau
 - d. Produk inovasi dan profilnya

- (2) **Semua anggota peneliti** harus dimasukkan ke luaran wajib penelitian dan pada artikel **disebutkan no kontrak pada bagian "ucapan terimakasih"**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7 **Hak dan Kewajiban Para Pihak**

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran wajib sebagaimana pada pasal 6

Pasal 8 **Pelaksanaan Penelitian**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah hasil revisi proposal yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang, RAB, dan instrumen penelitian ke SIPP dan menyerahkan *hardcopy* dokumen masing-masing 1 (satu) eksemplar paling lambat tanggal **20 Mei 2020**
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Buku catatan harian, laporan penggunaan dana, Laporan kemajuan ke SIPP dan menyerahkan *hardcopy* dokumen masing-masing 1 (satu) eksemplar paling lambat **7 Oktober 2020**
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Catatan Harian, Laporan Akhir, kwitansi pengeluaran, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah, profil pada SIPP paling lambat **13 November 2020**
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan Hardcopy Catatan Harian, Laporan Akhir, kwitansi pengeluaran, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah, profil masing-masing satu eksemplar kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat **31 Desember 2020**
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan luaran wajib sebagaimana pada Pasal 6 paling lambat pada tanggal **31 Agustus Tahun 2021** dengan status **PUBLISHED**
- (6) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Format font Times New Romans Ukuran 12 spasi 1,5
 - b. Bentuk/ukuran kertas A4;
 - c. Warna *cover* (d disesuaikan dengan ketentuan di panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2020)
 - d. Di bawah bagian sampul *cover* ditulis:

Dibiayai oleh:

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Semarang
Nomor : SP DIPA-023.17.2.677507/2020, tanggal 27 Desember 2019, sesuai dengan
Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian Dana DIPA UNNES Tahun 2020
Nomor: 23.27.4/UN37/PPK.3.1/2020, tanggal 27 April 2020.

Pasal 9
Monitoring dan Evaluasi

- (1) **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2020.
- (2) **PIHAK KEDUA** selaku Ketua Pelaksana Penelitian **wajib hadir** dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Internal, jika berhalangan wajib memberikan kuasa kepada anggota tim peneliti dalam judul yang sama.

Pasal 10
Penilaian Luaran

Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11
Penggantian Ketua Pelaksana

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan penelitian ini dapat dibenarkan apa bila telah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas BLU.
- (4) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 12
Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA belum menyelesaikan** tugasnya dan atau **terlambat** mengirim dan mengunggah laporan Kemajuan, catatan harian, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) dan Laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan **sanksi denda sebesar 1‰** (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya **5% (lima persen)** terhitung dari tanggal jatuh tempo (13 November s.d. 31 Desember 2020)
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu tanggal **31 Desember 2020**, **PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka **PIHAK KEDUA** dikenai **sanksi denda** berupa **mengembalikan dana 30% dari dana penelitiannya** ke Kas BLU dan **sanksi administratif tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut**
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi luaran yang telah dijanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sampai dengan tanggal **31 Agustus 2021**, maka:
 - a. **PIHAK KEDUA** dikenakan **sanksi denda** berupa **mengembalikan dana biaya publikasi sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)** ke kas BLU
 - b. **PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan proposal penelitian** pendanaan LPPM UNNES dalam kurun waktu **2 (dua) tahun berturut-turut baik sebagai Ketua maupun Anggota**
- (4) Apabila **PIHAK KEDUA tidak hadir** dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi **tanpa pemberitahuan** sebelumnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana Tahap Kedua sebesar 30%** ke Kas BLU.

Pasal 13 **Pembatalan Perjanjian**

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**

Pasal 14 **Pajak-pajak**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan bukti pembayaran pajak kepada **PIHAK PERTAMA**

Pasal 15 **Peralatan dan/alat Hasil Penelitian**

- (1) Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari Pelaksana Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan **PIHAK PERTAMA** sebagai pemberi dana.
- (3) Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau peralatan yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara, dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST)

Pasal 16 **Keadaan Memaksa (*force majeure*)**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan keadaaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak berwajib dan **PARA PIHAK** dengan etiket baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 17 **Penyelesaian Sengketa**




Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Tinggi Semarang

**Pasal 18
Lain-Lain**

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**Pasal 19
Penutup**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
 	
Dr. Suwito Eko Pramono, M.Pd. NIP. 195809201985031003	Dr. Sungkowo Edy Mulyono, S.Pd., M.Si. NIP. 196807042005011001



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Sungkowo Edy Mulyono, S.Pd., M.Si.
NIP : 196807042005011001
Unit Kerja : Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Semarang

Dengan ini menyatakan bahwa Penelitian saya berjudul:

"MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN BERBASIS WORK SUPERIOR
COMPETENCE MELALUI PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DI KOTA SEMARANG"
yang dibiayai oleh DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Universitas Negeri Semarang Nomor: SP
DIPA-023.17.2.677507/2020, tanggal 27 Desember 2019, dengan Surat Perjanjian Penugasan
Pelaksanaan Penelitian Dana DIPA UNNES Tahun 2020 Nomor: 23.27.4/UN37/PPK.3.1/2020, tanggal
27 April 2020, adalah **bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana
lain.**

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidak sesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia
dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya
penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 27 April 2020

Mengetahui,
Ketua LPPM UNNES

Dr. Suwito Eko Pramono, M.Pd.
NIP. 195809201985031003

Yang menyatakan,
Ketua Pelaksana

Dr. Sungkowo Edy Mulyono, S.Pd., M.Si.
NIP. 196807042005011001